

Evaluasi Pelaksanaan Model Universitas Membangun Desa (UMD)



Evaluasi Pelaksanaan Model Universitas Membangun Desa (UMD)

Evaluasi Pelaksanaan Model Universitas Membangun Desa (UMD)

ISBN: 978-623-6080-01-6

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2020 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Tim Penulis

J. Prio Sambodho

Marzi Afriko

Tim Penyunting

Tim *Research & Evaluation* KOMPAK

Tim *Communication & Knowledge Management* KOMPAK

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini. Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini. Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini dapat disalin dan disebarakan untuk tujuan non-komersial. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, silakan menghubungi **communication@kompak.or.id**

Publikasi juga tersedia di **www.kompak.or.id**

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta 10320 Indonesia

T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090

E: info@kompak.or.id

www.kompak.or.id

KATA PENGANTAR

Model Universitas Membangun Desa (UMD) merupakan salah satu inisiatif yang difasilitasi oleh Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), sebuah Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia, dengan bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa). Model UMD bertujuan untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada yaitu program pengabdian masyarakat perguruan tinggi berbasis mahasiswa (Kuliah Kerja Nyata, KKN) agar dapat lebih berkontribusi terhadap pembangunan desa, komunitas dan pemerintah daerah setempat dimana kegiatan dilaksanakan.

Inisiatif ini kemudian diujicobakan oleh KOMPAK sejak Juni 2016–Juni 2017, yang kemudian lebih dikenal sebagai UMD–KKN Tematik. Uji coba ini dilaksanakan oleh empat perguruan tinggi yang terpilih setelah rangkaian proses seleksi, yaitu UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Jember, dan *Alauddin Center for Community Development* (ACCED) UIN Alauddin Makassar. Tema KKN dari setiap perguruan tinggi terpilih ini beragam dan telah melalui proses diskusi dengan bersama KOMPAK dan pelaku pembangunan di lokasi untuk mematangkan rancangan kegiatan yang sesuai dengan kompetensi sekaligus sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.

Sedari awal uji coba model UMD–KKN Tematik hingga saat ini, KOMPAK terus menggandeng perguruan tinggi untuk terlibat dalam pembangunan desa, termasuk memfasilitasi diskusi antara perguruan tinggi dengan pejabat pemerintah terkait dan masyarakat. Diskusi-diskusi ini ditujukan untuk memperkuat jejaring aktor pembangunan desa, agar dapat berkolaborasi secara lebih tepat guna. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, penguatan komitmen dan kualitas kepemimpinan, investasi yang lebih tepat sasaran sekaligus pembentukan kelembagaan menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan model dalam jangka panjang.

Pasca uji coba dibutuhkan kajian untuk memahami proses implementasi, praktik baik dan pembelajaran dari lapangan; terlebih lagi menjelang akhir masa program KOMPAK. Evaluasi ini akan menjadi dasar untuk umpan balik terhadap desain model UMD–KKN Tematik yang akan menjadi sumbangsih KOMPAK terhadap kemitraan antara aktor akademis dengan desa dan masyarakat untuk pencapaian desa yang mandiri dan masyarakat yang lebih sejahtera.

Kami berharap, hasil evaluasi dari model UMD–KKN Tematik yang tercakup di dalam laporan ini tidak hanya memberikan gambaran yang lebih jelas tentang desain dan implementasi model UMD–KKN Tematik tetapi juga mampu mendorong replikasi dan penyempurnaan desain yang telah diujicobakan. Kami percaya kerja sama dan kerja bersama dibutuhkan untuk mencapai tujuan UU Desa. Oleh karena itu, model UMD–KKN Tematik perlu untuk terus difasilitasi agar dapat menjadi katalisator inovasi dan kolaborasi di tingkat daerah. Semoga bermanfaat!



Ted Weohau
Director of Implementation, KOMPAK

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	v
I. Pendahuluan	1
A. Tujuan Evaluasi	4
B. Metode Evaluasi	4
C. Kerangka Evaluasi.....	6
II. Evaluasi Implementasi Model di Lapangan	7
A. Efektivitas Model UMD.....	7
B. Relevansi.....	15
C. Efisiensi	16
D. Keberlanjutan	17
III. Poin Pembelajaran dan Rekomendasi	21

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kondisi Implementasi Kegiatan KKN Tematik Model UMD di Daerah	27
Lampiran 2. Tabel ringkasan kondisi implementasi inisiatif UMD-KKN tematik di tingkat desa.....	43
Lampiran 3. Alur Pelaksanaan KKN Tematik Model UMD	44
Lampiran 4. SK Tim Teknis UMD-KKN Tematik Kab. Pangkep	45
Lampiran 5. MoU/Nota Kesepahaman Pemkab Pangkep dan UNEJ.....	53

DAFTAR KOTAK

Kotak 1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Uji Coba Model UMD Tahun 2016–2017	3
Kotak 2. Kategori Narasumber Evaluasi.....	5
Kotak 3. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) dalam UMD-KKN Tematik.....	9
Kotak 4. Pengembangan Daerah Wisata Desa Glingseran	12
Kotak 5. Pengarusutamaan GESI dalam Buku Panduan UMD KKN UIN Ar-Raniry.....	14
Kotak 6. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Mengenai PT Membangun Desa.....	18
Kotak 7. Tim Teknis UMD Kab. Pangkep	19
Kotak 8. Legitimasi Nota Kesepahaman (MoU) UMD KKN Tematik	22
Kotak 9. Kegiatan Ekonomi Kreatif Anyaman Eceng Gondok.....	30
Kotak 10. Rakor Kemiskinan dan MoU 23 PT	32



RINGKASAN EKSEKUTIF

Terdapat sumber daya dan potensi yang dapat dimanfaatkan langsung untuk pembangunan desa, yaitu ribuan perguruan tinggi (PT) di Indonesia yang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) atau kegiatan sejenis setiap tahunnya.

Menyadari potensi ini, KOMPAK bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa), sejak tahun 2016 melakukan uji coba pelaksanaan kegiatan KKN yang lebih tepat guna, khususnya untuk pembangunan desa. Uji coba model kegiatan ini disebut Universitas Membangun Desa (UMD) yang diharapkan mampu mengubah persepsi dan kerangka pikir pemangku jabatan terhadap kegiatan KKN dan sejenisnya. Para pemangku kebijakan diharapkan mau dan mampu melihat kegiatan KKN atau kegiatan yang serupa sebagai sebuah aset lokal (*existing local resources*) dalam membangun desa, bukan sekadar sebagai sebuah kegiatan rutinitas mahasiswa sebelum menjadi sarjana. UMD tidak dirancang sebagai sebuah program, tapi lebih sebagai sebuah pendekatan untuk mendorong kolaborasi berbagai pihak dalam membangun desa dengan memanfaatkan kegiatan KKN atau kegiatan pengabdian yang serupa secara lebih optimal.

Studi ini diarahkan untuk mengevaluasi model UMD guna mendapatkan poin pembelajaran utama untuk peningkatan efektivitas dan penyebaran model UMD ke depan. Evaluasi dilakukan di tiga provinsi, yaitu Aceh, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan di mana KOMPAK telah mendukung uji coba KKN model UMD sebelumnya. Pada saat uji coba PT yang mendapat dukungan adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh di Aceh, Universitas Jember (UNEJ) di Jawa Timur, Universitas Katolik Parahyangan di Jawa Barat dan UIN Alauddin Makassar di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, evaluasi ini diperluas cakupannya untuk melihat pembelajaran pelaksanaan KKN model UMD di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) yang secara khusus mendapat dukungan teknis dari KOMPAK. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep telah menandatangani kesepakatan pelaksanaan UMD KKN-Tematik dengan sejumlah PT dan mengundang mahasiswa KKN dari UNEJ untuk melaksanakan model UMD. Dalam evaluasi ini, tim peneliti mewawancarai 61 responden (40 responden laki-laki, 21 responden perempuan), dan melakukan observasi langsung ke tujuh desa di tiga provinsi di mana kegiatan UMD dijalankan oleh PT mitra.

Evaluasi pelaksanaan model UMD di tiga daerah menunjukkan bahwa secara institusional, inisiatif UMD oleh KOMPAK berhasil mendorong dan menginspirasi berbagai pihak untuk mengoptimalkan sumber daya lokal seperti kegiatan KKN, serta mampu memicu kerja sama kolaboratif dan inovatif antar pemangku kepentingan daerah. Rekognisi yang kuat terhadap potensi model UMD KKN-Tematik dalam mempercepat pembangunan desa diberikan oleh PT, pemerintah daerah (pemda), dan pemerintah desa (pemdes). Hal ini ditindaklanjuti dengan beberapa inisiatif daerah, seperti (i) pengintegrasian kegiatan KKN model UMD ke dalam siklus perencanaan daerah oleh Pemkab Pangkep, (ii) perluasan inisiatif sistem informasi dari 10 desa menjadi lebih dari 100 desa di Kabupaten Bondowoso, dan (iii) menginspirasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh untuk membentuk forum kolaborasi antar PT (konsorsium PT) dalam upaya penanggulangan kemiskinan. **Pada saat yang sama, implementasi di tingkat desa masih menghadapi tantangan yang signifikan bagi inisiatif model UMD KKN-Tematik ini.** Dari hasil evaluasi ditemukan program-program pengembangan ekonomi lokal, seperti program kewirausahaan dan pengembangan desa wisata masih belum menunjukkan hasil yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada celah yang perlu dijembatani, khususnya dalam hal kapasitas teknis dalam pelaksanaan UMD KKN-Tematik di masa depan.

Oleh karena itu, UMD perlu untuk tetap didorong sebagai katalisator inovasi dan kolaborasi di tingkat daerah. Dalam hal ini, KOMPAK dapat memfokuskan perannya melalui kegiatan *cross-learning*, penyebaran praktik baik, dan *knowledge management*, khususnya untuk mendukung pengembangan konsep pembangunan desa yang lebih tepat guna dan berkelanjutan.



BUMDes Desa Pitue, Kab. Pangkep



I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, PT diharapkan untuk mengisi tiga peran di dalam masyarakat, yang dikenal sebagai konsep Tridharma yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai perwujudan peran pengabdian kepada masyarakat, PT di Indonesia mengadakan kegiatan bagi mahasiswa tahun terakhir untuk turun langsung ke masyarakat, dan melakukan kegiatan yang berdampak langsung bagi komunitas, yang dikenal sebagai kegiatan kuliah kerja nyata (KKN). Terdapat ribuan PT di Indonesia¹ yang melakukan program KKN setiap tahunnya yang merupakan sumber daya dengan potensi yang besar untuk berkontribusi langsung bagi pembangunan, terutama di tingkat desa sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). UU Desa memberikan kewenangan bagi pemdes untuk menentukan arah pembangunan desanya yang disertai dengan dukungan anggaran yang besar.

Saat ini, belum ada panduan yang baku dan wajib dalam pelaksanaan KKN. Pada tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti)² mengeluarkan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII³ yang memuat panduan mengenai pelaksanaan KKN, tetapi tetap menekankan bahwa desain operasional dan cara penyelenggaraan KKN disesuaikan dengan kondisi masing-masing PT. Dengan demikian, KKN masih lebih banyak dilakukan sebagai kegiatan yang berorientasi jangka pendek, sementara, dan tidak terintegrasi dengan perencanaan pembangunan yang lebih besar.

¹ Terdapat 917 akademi, 309 politeknik, 2.515 sekolah tinggi, 242 institut, 639 universitas, 38 akademi komunitas. Sumber: <https://forlap.ristekdikti.go.id/perguruantinggi/homegraphpt> (Diakses pada 8 Februari 2020).

² Per tahun 2019 berubah nama menjadi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Indonesia (Kemenristek/BRIN).

³ Secara konseptual, Panduan KKN-PPM ini memuat kebaruan dengan mencantumkan sejumlah target capaian pemberdayaan masyarakat secara terukur, seperti meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan menurunnya angka kematian ibu melahirkan (IKM). Panduan ini juga merekognisi bahwa KKN dapat dikembangkan menggunakan prinsip kemitraan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan. Panduan ini juga menyebutkan landasan pembaruan KKN-PPM ini, yaitu untuk mengubah paradigma pembangunan menjadi pemberdayaan dengan konsep *co-creation*, *co-financing* dan *co-benefit*; dan hilirisasi hasil-hasil riset dosen yang dapat diterapkan kepada masyarakat melalui program KKN-PPM; serta mengembangkan tema-tema KKN-PPM yang bermitra dengan pemerintah dan dunia usaha.

Oleh karena itu, KOMPAK melihat kegiatan KKN sebagai aset yang selama ini masih banyak terabaikan, meski sebenarnya merupakan kegiatan yang strategis dalam membantu pembangunan di tingkat desa. KOMPAK menyadari bahwa pembangunan tidak terbatas pada pekerjaan pemerintah, dan dalam hal ini PT dan mahasiswanya adalah potensi yang mampu berkontribusi. Dimulai tahun 2016, KOMPAK berupaya mengubah pendekatan lama KKN dengan pendekatan baru melalui model Universitas Membangun Desa (UMD) yang bertujuan untuk mengoptimalkan program KKN yang selama ini banyak dilakukan secara parsial, jangka pendek, dan *ad-hoc*, menjadi kegiatan yang bersifat lintas tahun, berorientasi pada keberlanjutan, dan berfokus pada kegiatan yang memiliki dampak maksimal. Strategi KOMPAK untuk memaksimalkan kegiatan KKN yang sudah berjalan sebagai mekanisme rutin dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia sejalan dengan prinsip inovasi KOMPAK, yaitu selalu memaksimalkan investasi sumber daya yang terbatas, demi menghasilkan dampak yang maksimal dan berkelanjutan.

Model UMD yang diinisiasi KOMPAK ini mendorong pola KKN yang lebih berorientasi pada kegiatan yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan desa, berdampak tinggi dan berkelanjutan di tingkat desa. Perbedaan utama desain UMD-KKN Tematik dengan KKN reguler adalah pada intensifikasi penilaian kebutuhan pembangunan desa dengan cara konsultasi intensif dengan pemangku kepentingan lokal dan kegiatan yang bersifat multi tahun. Secara teknis, UMD-KKN Tematik dimulai dengan lokakarya desain program KKN yang memastikan keterlibatan pemdes ketika merencanakan program, termasuk memastikan dukungan dan komitmen keterlibatan desa selama pelaksanaan program. Saat merancang program, juga diperoleh rencana kerja (renja) dengan memasukkan target dan pencapaian *output* selama periode implementasi, termasuk rencana penganggaran dan evaluasi kegiatan.⁴

Pada periode Juni 2016–Juni 2017, KOMPAK mendukung pelaksanaan pilot project UMD-KKN Tematik ini. Melalui seleksi *call for proposal*, terpilihlah 4 perguruan tinggi dari total 28 proposal yang diajukan oleh berbagai PT di Indonesia, yaitu: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Jember, dan *Alauddin Center for Community Development* (ACCED) UIN Alauddin Makassar. Keempat PT ini kemudian melaksanakan uji coba model UMD dengan tema yang berbeda-beda, yang telah diajukan dan dimatangkan bersama KOMPAK, sebagaimana berikut:

1. UIN Ar-Raniry, Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, melibatkan 90 mahasiswa di tiga desa.
2. Universitas Katolik Parahyangan, Program Pendampingan Penyusunan dan Pemutakhiran Data Desa, melibatkan 64 mahasiswa di tiga desa.
3. Universitas Jember, Program Pengembangan Sistem Informasi Desa (SAID), melibatkan 211 mahasiswa di sepuluh desa.
4. ACCED UIN Alauddin, Program Penguatan Peran Rumah Tangga dalam Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak melalui KKN Berbasis Aset, melibatkan 249 mahasiswa di dua desa.

⁴ Untuk skema teknis alur pelaksanaan KKN tematik model UMD, lihat Lampiran 3.

Selain memberikan dukungan dalam bentuk hibah kepada empat PT untuk mendukung pelaksanaan model UMD di tingkat lokal, pascapilot kemudian KOMPAK memfasilitasi forum pembelajaran *peer to peer learning* untuk kampus yang tertarik mengadopsi model dan menempatkan diri sebagai katalisator dan fasilitator kerja sama dan inovasi antarpemangku kepentingan di tingkat daerah. Forum tersebut ditujukan untuk meningkatkan rekognisi KKN sebagai aset lokal dalam pembangunan, yaitu melalui kolaborasi dengan model *Campus Partners* UMD sebagai mentor dan fasilitator, termasuk upaya bekerja sama dengan Kemenristekdikti serta Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperluas cakupan model ini di kalangan kampus Pendidikan Tinggi Islam. Forum ini melibatkan kampus mitra, pemda, dan penerima manfaat dari penerapan model UMD.

Kotak 1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Uji Coba Model UMD Tahun 2016–2017

KOMPAK bersama 4 perguruan tinggi melakukan uji coba model Universitas Membangun Desa (UMD) pada Juli 2016 dengan membawa tema yang berbeda-beda, yaitu:

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| a. UIN Ar-Raniry
untuk Pemberdayaan
Ekonomi Perempuan | b. Universitas
Parahyangan untuk
Monografi Data Desa | c. Universitas Jember
untuk Sistem
Informasi Desa | d. UIN Alauddin Makassar
untuk Peningkatan
Kesehatan Ibu dan Anak |

Kegiatan UMD dimulai dengan penentuan lokasi, diskusi perencanaan, serta pelaksanaan kegiatan melalui penerjunan mahasiswa ke desa dampingan. Sebagai tindak lanjut evaluasi kegiatan pada April 2017, KOMPAK melakukan survei kepada 157 mahasiswa, 15 orang aparat desa, dan penanggung jawab pelaksanaan model UMD di keempat PT tersebut.

Survei menunjukkan ada umpan balik yang baik dari berbagai pihak. Mayoritas mahasiswa menyatakan kepuasan mereka atas pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dan bersedia merekomendasikan model UMD kepada rekan-rekannya. Hal senada juga diungkapkan oleh pihak desa. Desa mampu melihat peran PT sebagai salah satu bentuk kolaborasi dalam pembangunan. Bagi universitas, keunikan model UMD terletak pada sifat kegiatan yang lebih fokus, berkelanjutan, dan partisipatif.

Namun, perbaikan untuk kegiatan model UMD di berbagai sisi masih diperlukan. Mahasiswa membutuhkan kegiatan pembekalan yang lebih komprehensif, koherensi kemampuan mahasiswa dengan tema kegiatan, memastikan kesiapan desa lokasi kegiatan, dukungan dan pemantauan yang intensif oleh dosen dan universitas serta komunikasi antarpihak. Walaupun keberlanjutan kegiatan telah diformalkan dari sisi regulasi di tingkat desa dan kabupaten, desa masih membutuhkan dukungan dan bantuan dikarenakan keterbatasan kemampuan teknis. Desa juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam pelaksanaan model UMD untuk mendongkrak dampak positif dari kegiatan UMD (baik antar PT maupun melibatkan pihak swasta).

A. Tujuan Evaluasi

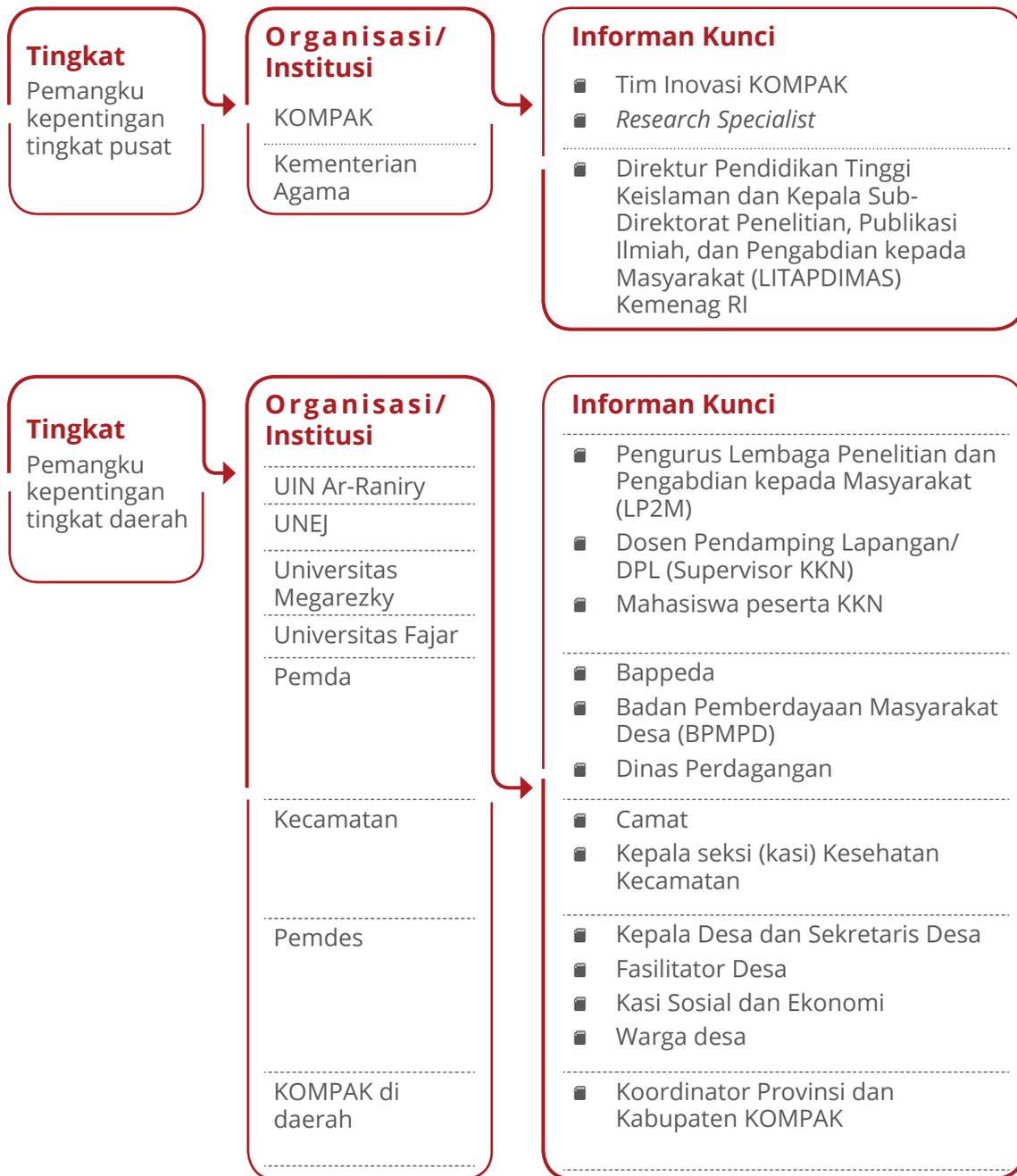
Keterlibatan langsung KOMPAK dalam mendukung adopsi dan implementasi UMD akan berakhir, maka evaluasi ini diarahkan untuk mengevaluasi model UMD untuk mendapatkan poin pembelajaran utama untuk peningkatan efektivitas dan penyebaran model UMD ini lebih lanjut. Harapannya, UMD dapat menjadi model arus utama di seluruh PT di Indonesia. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendokumentasikan bukti sejauh mana model UMD dapat menginspirasi pemangku kepentingan di tingkat lokal dalam memanfaatkan program KKN untuk menanggulangi masalah-masalah pembangunan di desa.
2. Prasyarat untuk kemitraan PT dan masyarakat yang efektif dan bekerja sama *vis-à-vis* model UMD dengan menilai aspek-aspek berikut: keterlibatan pemangku kepentingan, tingkat komitmen dan kepemimpinan, investasi dan pembentukan kelembagaan.
3. Memberikan gambaran tentang implementasi KKN model UMD dengan mendokumentasikan hambatan dan keberhasilan serta pembelajaran dari kegiatan pilot UMD oleh UIN Ar-Raniry (Aceh), ACCED UIN Alauddin (Sulawesi Selatan), dan UNEJ (Jawa Timur). Rekomendasi tentang bagaimana mempertahankan dan menyebarkan adaptasi KKN model UMD oleh pemangku kepentingan lokal dalam jangka panjang, dengan atau tanpa dukungan KOMPAK.

B. Metode Evaluasi

Evaluasi ini menyertakan analisis terhadap sejumlah literatur hukum tentang program KKN dan dokumen program UMD sebagai bagian dari data sekunder. Studi kasus dilakukan di tiga daerah di mana terdapat PT percontohan pelaksanaan KKN model UMD: UIN Ar-Raniry (Banda Aceh) dan UNEJ (Jawa Timur) sementara di Sulawesi Selatan, selain pengalaman UMD oleh UIN Alauddin, studi ini juga melihat pengalaman Universitas Megarezky dan Universitas Fajar dari Makassar, sebagai universitas yang melaksanakan UMD-KKN Tematik di Kab. Pangkep. Adopsi UMD-KKN Tematik oleh kedua PT ini (Universitas Fajar dan Universitas Megarezky) dapat dilihat sebagai hasil perluasan dari model UMD yang diinisiasi KOMPAK. Dengan demikian, pengalaman mereka dalam mengimplementasikan model ini penting untuk turut dimasukkan dalam cakupan studi. Wawancara dan observasi lapangan dilakukan pada minggu pertama sampai dengan minggu ketiga Desember 2019.

Kotak 2. Kategori Narasumber Evaluasi

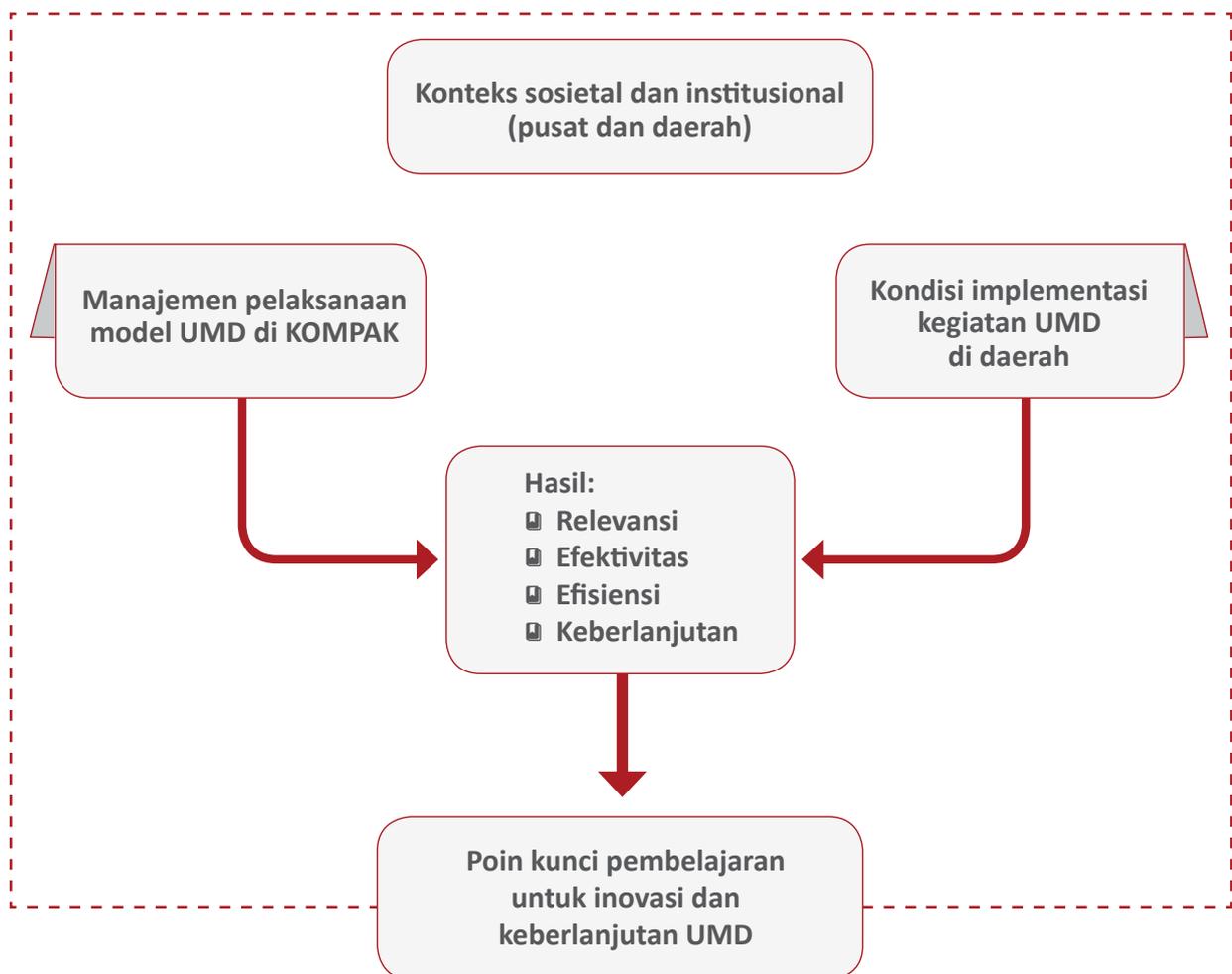


Secara total, tim peneliti telah mewawancarai 61 (40 laki laki, 21 perempuan) responden, dan melakukan observasi langsung ke tujuh desa di mana kegiatan UMD dijalankan oleh universitas-universitas mitra (tiga desa di Kab. Aceh Barat, dua desa di Kab. Bondowoso, dan dua desa di Kab. Pangkep)

C. Kerangka Evaluasi

Evaluasi ini menggunakan pendekatan evaluasi formatif, dengan fokus pada proses dan hasil proyek UMD. Kerangka evaluasi berfokus pada tiga aspek utama: penilaian organisasi internal program UMD, penerapan model UMD oleh mitra lokal (PT dan pemda), dan penilaian hasil implementasi model UMD. Aspek konteks sosial dan kelembagaan juga diintegrasikan ke dalam analisis temuan. Temuan-temuan dari evaluasi ini akan digunakan untuk memberikan langkah-langkah praktis dan rekomendasi untuk mempromosikan inovasi yang lebih besar dan adopsi model UMD yang lebih luas oleh mitra terkait di masa depan (Gambar 1).

Gambar 1. Kerangka evaluasi program UMD



II. Evaluasi Implementasi Model di Lapangan

A. Efektivitas Model UMD

Dengan dukungan KOMPAK yang berperan sebagai katalisator, model UMD telah menghasilkan beberapa kegiatan yang memicu kolaborasi yang inovatif antar pemangku kepentingan di tingkat daerah. Semenjak tahun 2017, setelah berakhirnya dukungan KOMPAK secara langsung terhadap empat PT dalam mengimplementasi UMD-KKN Tematik, KOMPAK melanjutkan dukungan dengan memfokuskan pada keberlanjutan dan proliferasi KKN model UMD ini di tingkat daerah. Dalam upaya penguatan dan perluasan model UMD-KKN Tematik, baik di tingkat nasional dan daerah dengan dukungan KOMPAK hingga tahun 2019 terdapat beberapa kegiatan yang telah berhasil diinisiasi, yaitu:

- Diseminasi model UMD melalui berbagai forum (KSP, Artikel 33, IAPA Conference), termasuk lokakarya *Training of Trainers* dalam upaya replikasi model UMD oleh Universitas Parahyangan kepada 23 universitas bersama IAPA.
- Keberlanjutan pelaksanaan model melalui kerja sama langsung dengan kabupaten mereplikasikan pengembangan sistem informasi desa (SAID) di 150 desa di Kab. Bondowoso pada tahun 2018–2019, pengembangan produk dan potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pengambilan data di Kab. Aceh Barat termasuk keperantaraan dengan *offtaker* untuk kesempatan memasukkan produk ke IKEA, dan perluasan lokasi pelaksanaan monografi data desa di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.
- Bersama Direktorat PDT Kemendesa dan Tim Pengembangan Ekonomi Lokal KOMPAK, model UMD melalui KKN tematik ini dilanjutkan oleh UNEJ dengan menggandeng pihak swasta untuk terlibat dalam penguatan kapasitas 3.200 mahasiswa saat pembekalan KKN Tematik pada bulan Juli 2018, terkait penanggulangan *stunting* dan pembangunan desa wisata.
- Kolaborasi di level operasional melalui *coaching clinic* dan *peer to peer learning model* di antaranya melalui Konferensi Internasional Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Islam oleh Kemenag 8–10 Oktober 2018, serta *roadshow* model UMD di Jawa Tengah.
- Penilaian awal untuk replikasi model UMD di Kab. Pangkep mengusung tema “Menuju Kemiskinan Satu Digit.”
- Pengembangan Platform Digital Inspirasi UMD (<https://inspirasi-umd.id>) untuk mendorong kolaborasi kegiatan dari berbagai pihak (pemdes, pihak swasta, pemda, dan PT) dalam usaha pemecahan problem desa.

Melalui inisiatif-inisiatif ini, UMD telah menunjukkan hasil dalam memicu kolaborasi dan pembelajaran silang di antara para pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam memanfaatkan kegiatan KKN sebagai aset dalam usaha pembangunan desa.

Berdasarkan temuan di Kab. Aceh Barat, Bondowoso, dan Pangkep, sudah ada minat yang tinggi di antara para aktor di tingkat daerah untuk berkolaborasi dalam usaha menyelesaikan masalah pembangunan desa dengan memanfaatkan kegiatan KKN oleh PT. Dari hasil temuan tim evaluasi, pengalaman berkolaborasi dalam pelaksanaan UMD-KKN Tematik mendorong kolaborasi PT, pemda, dan swasta melampaui bentuk kerja sama tradisional, seperti pelaksanaan kajian penelitian atau penyusunan dokumen perencanaan. Melalui inisiatif UMD yang memanfaatkan KKN sebagai mekanisme intervensi, kemitraan yang ada menjadi lebih konkret dan berada pada ranah yang lebih praktis dalam menyelesaikan masalah pembangunan di desa.

- **Di tingkat desa**, sudah terlihat adanya komitmen yang tinggi untuk mengakomodasi dan menyesuaikan kebijakan desa berdasarkan hasil dari UMD-KKN Tematik, seperti inisiatif pemdes untuk membiayai penambahan kegiatan, yakni pemberian makanan tambahan untuk peningkatan gizi balita di Pangkep.
- **Bagi perguruan tinggi**, pengalaman pilot program UMD-KKN Tematik dengan dukungan KOMPAK juga telah menunjukkan peningkatan minat dan kapasitas dari PT untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam perencanaan maupun implementasi kegiatan tersebut.

Sebagai contoh, pengalaman dari menjalankan UMD dengan KOMPAK membuat LP2M UNEJ memiliki kapasitas dan *mindset* yang lebih kreatif dalam menggali dan memanfaatkan potensi kemitraan lintas pihak. Koordinator Pusat Pemberdayaan LP2M UNEJ menyatakan, “Kalau dulu kita selalu berpikir kapasitas anggaran yang tersedia, itulah yang kita gunakan, tapi dalam hal ini adalah ruang mana yang bisa kita munculkan. Misalnya untuk tahun ini—pembekalan untuk dosen pembimbing lapangan (DPL)—kita menangkap isu strategis dan berbicara dengan mitra adakah slot yang bisa digunakan.” Kemitraan multipihak terutama dengan pemerintah pusat, dunia usaha, dan lembaga pembangunan internasional menjadi prinsip utama pelaksanaan UNEJ membangun desa. Dengan demikian, dapat memaksimalkan semua sumber daya alternatif yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan KKN tematik yang lebih efektif.

Di tingkatan institusional, pelaksanaan UMD juga telah memberikan inspirasi bagi pemkab dalam mengintegrasikan kegiatan UMD-KKN Tematik dengan siklus perencanaan. Sebagai contoh, Pemkab Pangkep saat ini aktif mendorong penyatuan rangkaian program UMD-KKN Tematik dengan siklus satu tahunan pembangunan desa, dan melihat peran strategis mahasiswa berdasarkan bidang keilmuannya untuk menjadi mitra dari dinas-dinas di pemda. Saat ini KKN Tematik di Kabupaten Pangkep diawali dengan musyawarah antara mahasiswa dan segenap pemangku kepentingan di desa dan kecamatan untuk mempertajam strategi kerja mahasiswa selama KKN Tematik. Musyawarah tersebut dinamakan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) KKN.

Musyawarah juga ditujukan agar mahasiswa mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk pendanaan dari desa (Kotak 3). Selain itu, pemda memiliki rencana untuk menggunakan kegiatan KKN Tematik sebagai salah satu mekanisme pilot yang hasilnya dapat digunakan oleh dinas-dinas. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Bappeda Pangkep menyatakan, "Kami berharap agar OPD terkait terpicu dengan UMD, bahkan saya sendiri mengangkat topik UMD saat latihan kepemimpinan III. Desa Bulu Cindea sebenarnya target Dinas Pariwisata. Sekarang hasil KKN wisatanya sudah bagus, tinggal dilanjutkan."

Kotak 3. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) dalam UMD-KKN Tematik

UMD-KKN Tematik di Kab. Pangkep menekankan relevansi antara ilmu pengetahuan dan penanganan permasalahan desa. Untuk itu, proses UMD memperkenalkan satu jenis musyawarah pada awal KKN Tematik antara mahasiswa dan berbagai pihak di tingkat desa, sebagai proses awal UMD saat mahasiswa sudah mulai tinggal di desa, yaitu dengan nama MMD.

Menurut Tim Teknis UMD, MMD bertujuan untuk membangun partisipasi semua pihak untuk mendukung kegiatan KKN Teknis sejak dari desa hingga ke tingkat kecamatan, sebagaimana terlihat saat di Desa Pitue, Kecamatan Ma'rang. Mahasiswa Jurusan Kebidanan dari Universitas Megarezky, Makassar saat itu secara formal mengundang pemerintah kecamatan, puskesmas, pemdes, dan para kader Posyandu ke MMD di kantor Desa Pitue. Sebagai bentuk dukungan, Pemdes Pitue mendanai jalannya MMD dengan menyediakan konsumsi bagi peserta.

Pertemuan setengah hari tersebut dipandu oleh sekretaris desa, dan dihadiri oleh staf Bappeda Pangkep selaku perwakilan Tim Teknis UMD. Hadir juga saat MMD seorang supervisor KKN dari Universitas Megarezky. Terlihat ketua mahasiswa mempresentasikan data dan masalah kesehatan masyarakat Desa Pitue, menjadi fokus KKN Tematik mereka, termasuk data kasus *stunting* yang mereka peroleh sebelumnya dari angkatan sebelumnya, dilengkapi data terbaru dari puskesmas. Pertemuan tersebut mendorong ahli gizi dan ahli kesehatan lingkungan Puskesmas Ma'rang untuk mengatasi secara kolaboratif. Inisiatif ini mendapatkan persetujuan sekaligus apresiasi dari perwakilan pemerintah kecamatan yang hadir yang menilai positif keinginan mahasiswa untuk terus memerhatikan permasalahan kesehatan masyarakat di Desa Pitue. Akan tetapi, untuk perbaikan berikutnya, MMD perlu mengundang masyarakat yang menjadi sasaran untuk berpartisipasi di forum, termasuk bidan dan perawat desa untuk menjadi peserta MMD.

Mahasiswa menyatakan MMD bermanfaat guna mempertajam rencana kegiatan KKN Tematik mereka, sebagai langkah awal membangun komitmen setiap pihak untuk membantu mengatasi permasalahan *stunting* di desa. Sekretaris desa saat itu juga langsung memberikan dukungan melalui program kesehatan lingkungan, terutama untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), seperti membantu pembangunan jamban sehat keluarga. Para mahasiswa menyatakan KKN tematik membuat mereka dapat belajar tentang kesehatan di masyarakat, sementara pihak universitas menilai model ini penting untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa di luar kelas

Di tingkat desa, berdasarkan kunjungan ke tujuh desa di tiga kabupaten, pendekatan UMD-KKN Tematik telah menghasilkan inisiatif-inisiatif yang mendapatkan dukungan dari pemdes dan pemkab. Kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh UMD-KKN Tematik dari perguruan-perguruan tinggi di daerah—baik yang merupakan mitra langsung KOMPAK atau PT yang mengadopsi pendekatan ini—telah menunjukkan hasil keluaran yang secara konkret mampu menyentuh kebutuhan desa dan dianggap positif oleh penerima manfaat di daerah (Lampiran 2). Beberapa inisiatif yang sudah dilakukan di tingkat desa adalah:

- Program KKN Tematik (KPM Inovatif) mahasiswa UIN Ar-Raniry, sejak dari pelatihan penganyaman hingga pemasaran hasil produk anyaman desa-desa di Kecamatan Arongan Lambalek mendapat dukungan Pemkab Aceh Barat termasuk pengalokasian dana kegiatan oleh tiga pemdes lokasi KKN Tematik. Program industri kerajinan anyaman enceng gondok juga telah menunjukkan adanya pola kolaborasi kemitraan yang luas. Dengan dukungan KOMPAK, UIN-Ar-Raniry mendatangkan pelatih anyaman dari Yogyakarta untuk melatih masyarakat membuat berbagai jenis produk anyaman dengan variasi yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik.
- Pengembangan sistem informasi desa dan pelayanan administratif desa berbasis digital di sepuluh desa di Kab. Bindowoso dan masih berlanjut hingga saat ini.
- Program pengembangan pariwisata, kewirausahaan, dan pembenahan sistem administrasi dan pelayanan kantor desa oleh mahasiswa UNEJ di Desa Bulu Cindea. Program ini mendapat dukungan dan dinilai oleh Pemkab Pangkep serta pemdes, telah tepat dengan potensi dan kebutuhan desa.
- Penanganan permasalahan kesehatan di Desa Pitue dan Bulu Cindea oleh mahasiswa Universitas Megarezky di Kab. Pangkep juga dianggap sesuai oleh Pemkab Pangkep dengan permasalahan kesehatan yang dihadapi warga.
- Tim Teknis UMD-KKN Tematik di Kab. Pangkep juga mengakui bahwa kegiatan KKN Tematik telah membantu pemda, seperti pengujian data-data kependudukan dan penghitungan angka balita terkena *stunting*.
- Universitas Fajar (UNIFA) Makassar, selain berkomitmen untuk terus melaksanakan KKN Tematik di Kabupaten Pangkep, juga berhasil mengidentifikasi kebutuhan peningkatan sumber daya desa. Dari hasil KKN tematik, UNIFA menyodorkan proposal kerja sama pelaksanaan sekolah teknik desa kepada Tim Teknis UMD. Ide tersebut terlihat diterima oleh Tim Teknis UMD untuk dibicarakan di internal pemkab, terutama dengan melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai pemangku kebijakan pembangunan desa di daerah. Sekolah yang dirancang tersebut tetap berbayar dan bersertifikasi untuk para aparatur pemdes, sehingga menurut UNIFA pembangunan desa akan lebih efisien dengan adanya tenaga teknik desa yang sudah dapat bekerja.

Namun, inisiatif-inisiatif UMD-KKN Tematik oleh PT di tingkat desa masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek keberlanjutan. Berdasarkan temuan tim evaluasi, dapat dilihat bahwa kegiatan-kegiatan KKN Tematik yang diinisiasi menggunakan model UMD sangat bervariasi dalam hal kualitas pelaksanaan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dan tata kelola desa.⁵ Secara umum ada beberapa pola yang dapat dilihat:

- Kegiatan UMD yang berfokus pada pembangunan sistem tata kelola, seperti pengembangan SAID di Bondowoso adalah yang **paling efektif** dan berkelanjutan.
- Kegiatan UMD yang berbentuk pelatihan keterampilan untuk pengembangan komoditas lokal seperti kegiatan yang dilakukan di Kab. Aceh Barat dan Pangkep menunjukkan beberapa **manfaat jangka pendek**, tetapi dampak jangka panjang dan keberlanjutannya masih rendah.
- Kegiatan yang **paling tidak efektif**, dan bahkan berpotensi membawa efek negatif terhadap tata kelola desa, adalah proyek-proyek pengembangan ekonomi desa yang melibatkan pembangunan infrastruktur besar. Hal ini seperti yang tim temukan di salah satu desa di Kab. Bondowoso (Kotak 4).



Pengrajin Anyaman Desa Kubu, Kab. Aceh Barat



Pengurus BUMDes dan TOKOPEDIA Desa Pitue, Kab. Pangkep

⁵. Untuk pembahasan temuan yang lebih mendetail untuk setiap daerah lihat Lampiran 1.

Kotak 4. Pengembangan Daerah Wisata Desa Glingseran

Desa Glingseran (Bondowoso) menjadi lokasi pengembangan daerah wisata alam yang dinamakan Taman Dewi Rengganis, dengan dukungan kegiatan pilot UMD-KKN Tematik oleh UNEJ pada tahun 2016-2017. Taman ini merupakan sebuah kompleks taman rekreasi bernuansa alam yang dibangun di sepanjang sungai kecil yang mengalir di kawasan persawahan, yang ditindaklanjuti berdasarkan permintaan dari Kepala Desa Glingseran. Pemandangan persawahan yang asri dan sungai kecil yang mengalir ke air terjun kecil dianggap sebagai daya tarik utama dari daerah wisata alam ini. Mahasiswa UNEJ, dengan dibantu oleh warga setempat membangun jalan setapak bambu mengelilingi taman dan pondok gazebo untuk menjadi tempat piknik dan rekreasi. Selain itu, di kompleks ini juga dibangun sebuah kolam, yang diperuntukkan sebagai kolam rekreasi bagi pengunjung. Sebagai akses ke kompleks taman ini, pemerintah desa membangun jalan akses berupa panel beton yang ditempatkan di atas parit irigasi dan tempat parkir kendaraan.

Pada masa awal setelah dibangun, menurut kepala desa, taman wisata ini didatangi oleh cukup banyak pengunjung. Namun kini jumlah pengunjung yang ada sudah jauh berkurang. Pada masa awal pembentukan tahun 2017, ada sekitar 30 keluarga yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) pengelolaan taman wisata ini, namun saat ini hanya ada delapan keluarga yang bertahan. Menurut kepala desa, daerah wisata ini sudah hampir tidak menghasilkan pemasukan lagi bagi desa karena tidak ada pengunjung.

Saat tim evaluasi melakukan kunjungan ke taman ini, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Selain tidak ada pengunjung dari luar, seluruh gazebo yang dibangun sudah rusak. Taman yang ada juga sudah tidak terawat sehingga didominasi oleh tanaman liar. Kolam renang rekreasi juga dipenuhi oleh air yang tidak mengalir dan keruh.

Kondisi Taman Dewi Rengganis ini sangat kontras dengan jumlah pendanaan yang diterima dalam usaha pengembangannya dari tahun 2017–2019. Hasil penelusuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), tercatat bahwa Pemdes Glingseran menganggarkan pembangunan taman wisata di APB Desa tahun 2017 dengan total 225 juta rupiah. Pemerintah desa mengalokasikan anggaran tersebut untuk membangun kolam renang, gazebo, flying fox dan fasilitas MCK. Pada tahun 2018, Kementerian Pariwisata mengalokasikan dana dalam bentuk DAK Fisik sebesar 1,34 miliar rupiah bagi dua kecamatan (Kec. Cermeo dan Kec. Wringin) untuk pembangunan gazebo, pagar pembatas, tempat ibadah, *viewing deck*, gapura, jalan setapak dan rambu-rambu. Tahun 2019, Pemerintah Desa Glingseran menganggarkan 45 juta rupiah dalam bentuk belanja modal untuk subbidang pariwisata. Kementerian Pariwisata juga secara khusus memberikan DAK Fisik kepada Desa Glingseran sebesar 363 juta rupiah untuk pembangunan gapura identitas, jalan dalam kawasan, dan tempat parkir. Desa Glingseran juga kembali mendapatkan 100 juta rupiah dalam bentuk bantuan keuangan dari provinsi.

Bukti bahwa pelaksanaan UMD-KKN Tematik di tingkat desa telah mampu mengubah dan memengaruhi pemerintahan desa dalam hal akuntabilitas dan transparansi juga masih terbatas. Berdasarkan wawancara dengan para pemangku kepentingan, sebagian besar kegiatan UMD-KKN Tematik di desa masih banyak berfokus dalam kegiatan yang bersifat fisik, namun belum banyak menangani salah satu masalah utama dalam pengembangan desa, yaitu masalah tata kelola. Kondisi Taman Wisata Rengganis di Desa Glingseran Kab. Bondowoso yang kini sudah terbengkalai menjadi contoh dampak negatif yang dapat terjadi dari pelaksanaan UMD-KKN Tematik. Hal ini dikarenakan perguruan tinggi hanya sekadar mengikuti aspirasi desa, tanpa masuk memahami ragam kendala pembangunan desa.

Keterbatasan dalam hal implementasi teknis UMD-KKN Tematik di tingkat desa disebabkan oleh masih kurangnya beberapa kapasitas kunci yang menjadi penentu kualitas pelaksanaan kegiatan:

- Kapasitas pemda dalam mendukung inisiatif yang dibentuk oleh program KKN, terutama setelah kegiatan yang dilaksanakan oleh PT di desa berakhir.
- Fleksibilitas dari pemda, terutama dalam hal siklus anggaran dalam mendukung kegiatan.
- Kemampuan dari pemdes dan pemkab dalam mendukung UMD-KKN Tematik masih sangat bervariasi, terutama dalam hal komitmen dan dukungan teknis pada saat pelaksanaan. Di sisi lain, desa yang mendapatkan pendampingan dari KOMPAK, seperti 10 desa di Bondowoso yang merupakan desa dampingan KOMPAK, terlihat memiliki kapasitas yang lebih tinggi dalam memfasilitasi kegiatan UMD-KKN Tematik.
- Keterbatasan dalam menyelaraskan kepentingan pemda dan PT. Terlepas dari komitmen pejabat terkait yang kuat di ketiga daerah, ternyata masih ditemukan adanya keterbatasan implementasi yang efektif di lapangan, terutama oleh jajaran pelaksana di pemda.

Prinsip GESI (*Gender Equality and Social Inclusion*, kesetaraan jenis kelamin dan inklusi sosial), terutama dalam aspek pengarusutamaan dan inklusi kelompok marjinal, belum terimplementasi secara maksimal dalam pelaksanaan inisiatif-inisiatif UMD-KKN Tematik di tingkat desa. Saat ini, hanya UIN Ar-Raniry yang sudah secara formal memasukkan pendekatan GESI ke dalam panduan pelaksanaan UMD-KKN Tematik (Kotak 5). Meski demikian, panduan tersebut terlihat belum dapat digunakan sebagai panduan umum KKN Tematik—mengingat program yang dilaksanakan oleh UIN Ar-Raniry memang khusus untuk memberdayakan ekonomi perempuan. Oleh karena itu, pengarusutamaan GESI tetap diperlukan agar dapat diadaptasi sebagai panduan untuk setiap tema UMD-KKN Tematik. Prinsip ini harus diarahkan sebagai proses yang tidak selalu dibatasi sebagai hasil akhir yang diperoleh dari UMD-KKN Tematik, seperti khusus untuk kelompok perempuan. Hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan para pemangku kepentingan di tingkat pemda dan pemdes, menunjukkan bahwa belum ada mekanisme atau kesadaran dari pemangku kepentingan akan mekanisme inklusi, baik pada tingkat desain program maupun pada tingkat implementasi program kegiatan intervensi di desa.

Kotak 5. Pengarusutamaan GESI dalam Buku Panduan UMD KKN UIN Ar-Raniry

Kapasitas yang kuat dari jajaran LP2M terhadap perspektif gender dan pembangunan menjadi modal UIN Ar-Raniry untuk mengarahkan rancangan KPM Inovatif yang mereka susun. Dengan demikian, pendekatan yang dipilih KKN adalah sebagai program khusus untuk memberdayakan ekonomi kelompok perempuan. Faktor ini juga yang membuat pilot UMD UIN Ar-Raniry berbeda dari tiga perguruan tinggi lainnya yang mendapat hibah dari KOMPAK. Buku panduan UMD yang telah ditulis oleh UIN Ar-Raniry menjelaskan alasan kenapa memilih perempuan sebagai subyek—karena selama ini KKN tidak memiliki kelompok sasaran khusus.

Untuk pengarusutamaan prinsip-prinsip GESI dalam pelaksanaan KKN Tematik. Salah satu bagiannya mengulas bentuk-bentuk ketidakadilan gender, keterkaitan gender dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Para mahasiswa kemudian menerima pembekalan tentang perspektif GESI ini, agar mereka dapat melakukan pendampingan dengan analisis gender secara baik.

Buku panduan tersebut juga memuat sembilan langkah jalur analisis gender dalam desain program. Di antara jalur tersebut terlihat menekankan ketersediaan data atau informasi yang sudah dianalisis tentang kondisi gender dalam masyarakat. Dengan data yang tersedia, program dapat menentukan target output dan program, terutama nantinya program dapat mengukur kemajuan atau perkembangan pemberdayaan yang dilaksanakan berdasarkan indikator kesenjangan gender yang telah ditetapkan sebelumnya. Kendati telah terlaksana dengan cukup baik, tetapi kesuksesan pemberdayaan yang diinginkan masih terkendala oleh dinamika kegiatan ekonomi produktif yang telah dipilih sendiri dalam pendekatan ini.



Standing Banner KKN UIN Ar-Raniry di Desa Kubu, Kab. Aceh Barat



Bahan Anyaman di Desa Kubu, Kab. Aceh Barat



APBG Desa Kubu, Kab. Aceh Barat

B. Relevansi

Bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah, telah ada kesepakatan yang luas bahwa UMD-KKN Tematik lebih relevan dengan kebutuhan mereka dibandingkan dengan KKN selama ini.

- **Pemda:** UMD-KKN Tematik dianggap mampu membantu kebutuhan pemda untuk mencari inovasi dalam memecahkan permasalahan daerah dan mengisi “ruang kosong teknis,” yaitu kapasitas dalam melakukan penelusuran awal (*piloting*) suatu intervensi di tingkat desa seperti yang ditemukan di Bondowoso dengan program SAID oleh UNEJ. Di Kab. Pangkep, UMD-KKN Tematik dianggap mampu memantik inovasi kemajuan dalam pembangunan desa, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bappeda Kab. Pangkep, “Kami tidak mampu melahirkan loncatan pembangunan, tapi melalui program-program seperti UMD ini kami merasa ada loncatan.”
- **PT:** Pendekatan UMD yang menekankan pada kebutuhan desa dan keberlanjutan dianggap lebih relevan bagi pemenuhan kebutuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama seperti yang ditemukan di UNEJ.
 - Bagi PT, KKN tematik model UMD menjadi ajang yang strategis bagi pengembangan reputasi universitas dalam membangun keunggulan kompetitif mereka. UMD juga memiliki potensi sebagai proses yang dapat meningkatkan kesempatan riset bagi dosen dan peneliti di PT, seperti model yang sedang dibangun oleh UNEJ.
 - Bagi mahasiswa, model UMD secara luas telah dianggap mampu memberikan proses pembelajaran yang lebih relevan dengan proses studi, terutama dalam kemampuan untuk merumuskan pendekatan yang inovatif bagi permasalahan desa (Kotak 1 dan Kotak 3).
- **Desa:** Prinsip perencanaan partisipatif yang melibatkan desa dan bersifat jangka panjang adalah kelebihan dari pendekatan UMD-KKN Tematik ini. Dengan demikian, memberikan ruang bagi pemdes untuk menyelaraskan kegiatan KKN dengan kegiatan desa. Penyelarasan ini termasuk mengakomodasi kegiatan KKN ke dalam APB Desa. Tiga daerah evaluasi mengindikasikan desa sudah mau dan mampu untuk membiayai rangkaian proses dan kegiatan yang diinisiasi oleh kegiatan UMD-KKN Tematik. Kapasitas fiskal desa yang semakin besar menjadikan model ini menjadi salah satu cara bagi desa untuk meningkatkan kapasitas dalam mendesain rencana pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

C. Efisiensi

Secara institusional, strategi UMD yang memanfaatkan kegiatan KKN PT sebagai pintu masuk intervensi pembangunan desa, menunjukkan prinsip *value for money* yang tinggi. Pemda menilai pemanfaatan kegiatan KKN adalah salah satu strategi pembangunan desa yang berpotensi mengisi keterbatasan kapasitas pemda (termasuk desa), dalam mengembangkan *evidence based policy* (kebijakan berbasis bukti) secara efisien. Untuk itu, pemda perlu memiliki pemahaman yang jelas akan mekanisme dan potensi UMD-KKN Tematik dalam mendukung pemda merumuskan kebijakan yang didasarkan pada analisis permasalahan secara konseptual dan potensi solusi yang konkret. Praktik baik telah ditemukan di Kab. Bondowoso dan Kab. Pangkep, dimana pemerintah setempat tidak hanya mengapresiasi inisiatif UMD-KKN Tematik yang dilaksanakan oleh UNEJ ketika uji coba, tetapi juga telah berkomitmen untuk mengadopsi program yang disertai dukungan dana APBD. Harapannya, jika data empiris tersedia dan kegiatan uji coba intervensi kebijakan ini dapat dilakukan melalui kegiatan UMD-KKN Tematik maka pemanfaatan APBD dapat dioptimalisasi.

Dari sisi pelaksanaan teknis UMD-KKN Tematik oleh PT, ada kesepakatan bahwa manajemen UMD-KKN Tematik membutuhkan investasi sumber daya yang lebih intensif dan kapasitas yang lebih tinggi. Seorang pejabat UNEJ memperkirakan bahwa model UMD membutuhkan biaya 10–15 persen lebih tinggi dibandingkan dengan manajemen KKN regular. Mayoritas tambahan biaya ini dikeluarkan untuk kegiatan prapenelitian yang lebih intensif untuk UMD-KKN Tematik, sebelum para mahasiswa diterjunkan ke lokasi KKN. Peningkatan biaya ini juga terindikasi di Kab. Pangkep ketika Tim UNEJ mendatangkan tim yang lebih besar untuk pembekalan sekaligus berdiskusi dan menyepakati desa lokasi KKN dengan tim teknis dari pemda. Faktor ketersediaan sumber daya juga muncul sebagai satu persoalan yang merintangikan keberlanjutan KKN tematik, seperti oleh pihak UIN Ar-Raniry yang merasa harus terus mendapat bantuan biaya agar UMD-KKN Tematik dapat terus dilaksanakan.

Berdasarkan temuan evaluasi UMD-KKN Tematik di tingkat desa, masih dibutuhkan peningkatan kapasitas bagi PT untuk menyusun model intervensi pembangunan desa yang lebih matang. Berkaca dari temuan mengenai implementasi kegiatan KKN tematik model UMD di ketiga daerah evaluasi, di mana masih ditemukan adanya potensi kegiatan yang berpotensi menyebabkan pemborosan (Kotak 3), jika tidak diikuti pengaturan kegiatan dan *monitoring* yang baik. PT pelaksana UMD-KKN Tematik masih harus mendorong adopsi strategi yang lebih tepat guna dan mengedepankan efisiensi. Hal ini demi mengurangi risiko dampak negatif seperti pemborosan sumber daya di tingkat desa.

D. Keberlanjutan

Potensi penyebaran dan adopsi model UMD-KKN Tematik di masa depan memiliki peluang yang besar. Hal ini dikarenakan:

- Di tingkat nasional, adanya Perjanjian Kerja sama Bersama (PKB) antara Ditjen PDT Kemendesa dan DIKTIS Kemenag dapat dilihat sebagai salah satu pencapaian strategis model UMD untuk menjamin keberlanjutan model ini di masa depan (Kotak 6);
- Konsep kemitraan dan kolaborasi dalam pembangunan daerah saat ini sudah menjadi arus utama di kalangan para pemangku kepentingan di tingkat daerah, terutama untuk pemda;
- Kemitraan antara pemda dan institusi pendidikan sudah banyak berjalan di masa lalu, terutama dalam hal kajian dan penyusunan perencanaan daerah; dan
- Untuk daerah intervensi KOMPAK, ketertarikan pemda dan pemdes akan kemitraan dengan pihak nonpemerintah nontradisional seperti perguruan tinggi dan dunia usaha sudah tinggi, terutama karena pengalaman bekerja dengan inisiatif-inisiatif yang diinisiasi oleh KOMPAK.

Di tingkat desa, dengan adanya UU Desa yang memberikan kewenangan yang besar bagi pemdes untuk berinovasi, ada indikasi bahwa pemdes juga semakin melihat pentingnya kolaborasi dengan PT dan desa melalui kegiatan UMD-KKN Tematik. Beberapa desa di Jember mulai mengajukan diri untuk menjadi daerah lokasi UMD-KKN Tematik sekaligus memberikan komitmen finansial. Inisiatif ini dikarenakan reputasi UNEJ dalam menjalankan UMD-KKN Tematik termasuk di Kab. Pangkep. Pemdes di Kab. Pangkep juga telah berperan aktif memfasilitasi kelancaran pelaksanaan dan pencapaian target UMD-KKN Tematik agar selaras dengan permasalahan desa. Tim evaluasi menemukan adanya komitmen yang cukup tinggi dari desa untuk mengadopsi dan mendanai kegiatan yang diinisiasi oleh UMD-KKN Tematik seperti di Desa Bulu Cindea. Kepala Desa Bulu Cindea menyatakan, "Kami memberikan dana karena kami butuh, dan program mahasiswa ini yang menyentuh masyarakat." Selain itu menurut informasi dari Tim Teknis UMD, beberapa pemdes di Kab. Pangkep telah menambah pengalokasian anggaran belanja desa untuk memberi makanan tambahan (PMT Plus) kepada bayi dan balita setelah mendapat informasi tentang kondisi kesehatan masyarakat melalui kegiatan mahasiswa UMD-KKN Tematik.

Kotak 6. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Mengenai PT Membangun Desa

Salah satu pencapaian strategis program UMD oleh KOMPAK adalah keberhasilan untuk mendorong kerja sama di tingkat pemerintahan pusat melalui penandatanganan PKB antara Dirjen PDT Kemendesa dengan Dirjen DIKTIS Kemenag yang dilakukan pada tahun 2019. Kedua pihak sepakat berkolaborasi mengembangkan model PT membangun desa melalui program pengabdian masyarakat, yang tentunya ditujukan untuk diselenggarakan oleh perguruan tinggi keislaman di lingkungan Kemenag.

PKB yang melibatkan dua direktorat jenderal di masing-masing kementerian ini dapat dinilai sebagai langkah strategis awal untuk pengembangan model UMD ini ke depannya. PKB ini bertujuan memanfaatkan sumber daya yang ada di PT untuk mempercepat pembangunan dan kemandirian desa yang menjadi bagian dari tugas Kemendesa. Dalam PKB ini, juga disepakati bahwa perjanjian ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan satu rencana aksi yang diarahkan untuk merealisasikan model UMD di tingkat daerah.

UNEJ saat ini sedang menyusun buku “UNEJ Membangun Desa” yang didasarkan pada pengalaman UMD-KKN Tematik. Buku tersebut akan mengelaborasi prinsip-prinsip UMD meskipun belum sampai pada petunjuk teknis. UNEJ menargetkan akan ada dua panduan, di tingkat manajemen program dan modul pelaksanaan teknis di lapangan.

Namun, masih ada beberapa permasalahan dalam implementasi teknis kegiatan UMD-KKN Tematik di tingkat desa, khususnya yang berkaitan dengan keberlanjutan dan manajemen pascakegiatan. Beberapa permasalahan yang ditemukan adalah masih kurangnya kapasitas teknis dan komitmen dari pemda untuk menindaklanjuti dan terus mendukung inisiatif yang sudah dibangun oleh UMD-KKN Tematik;

- Analisis kelayakan bisnis yang terbatas di tingkat desa. Dalam program pengembangan produk lokal seperti di Kab. Aceh Barat dan Pangkep, unit usaha yang sudah dibuat tidak didasarkan pada analisis pasar dan permintaan yang memadai;
- Masih bervariasinya kapasitas dosen yang bertanggung jawab dalam membimbing mahasiswa UMD-KKN Tematik dalam mendesain kegiatan di desa; dan
- Belum ada panduan dan pedoman teknis, baik yang bersifat praktis dan konseptual yang bisa digunakan.

Institusionalisasi dari model UMD menjadi salah satu tantangan utama keberlanjutan, terutama dalam hal implementasi pelaksanaan secara teknis.

- Sejauh ini pihak PT, seperti LP2M UIN Ar-Raniry belum mengetahui dan menindaklanjuti mandat dan apa saja yang dapat mereka lakukan terkait adanya PKB ini, mengingat pengalaman yang ada masih terbatas menerima dukungan KOMPAK untuk penyelenggaraan UMD di Kab. Aceh Barat.

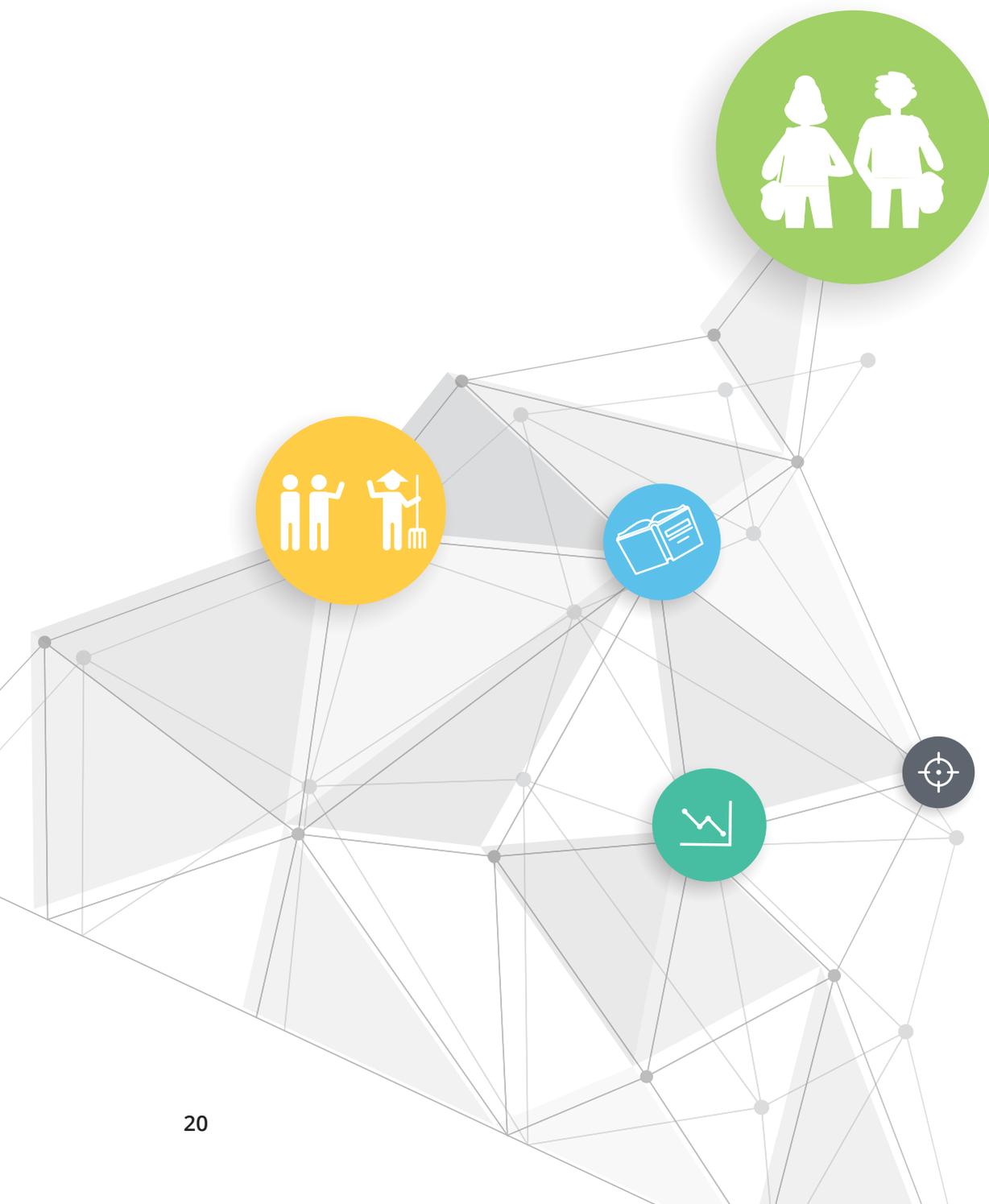
- Di Kab. Aceh Barat, selain oleh faktor kapasitas internal perguruan tinggi, termasuk kekuatan pendanaan, pengembangan konsep KKN tematik masih terbatas.
- Di Kab. Bondowoso, saat ini belum ada regulasi yang memperkuat pelaksanaan UMD, kecuali MoU yang masih memberikan dasar legalitas. Namun, belum memberikan kejelasan teknis mengenai pelaksanaan KKN tematik model UMD.
- Di Kab. Pangkep, UMD dilaksanakan melalui Tim Teknis UMD yang dikoordinasikan di bawah Bappeda. Meskipun Tim Teknis UMD telah mendapatkan SK dari Bupati, tetapi berdasarkan pengalaman dari Tim UMD UNEJ (Kotak 7), kinerja Tim Teknis di Kab. Pangkep masih belum maksimal dalam mengoordinasi kegiatan UMD yang melibatkan banyak PT.

Kotak 7. Tim Teknis UMD Kab. Pangkep

MoU antara 17 PT dan Pemkab Pangkep untuk penyelenggaraan KKN tematik tahun 2019 telah ditindaklanjuti oleh Bupati Pangkep dengan membentuk Tim Teknis UMD, yaitu melalui SK Bupati Nomor 222/2019. Tim Teknis bertugas memfasilitasi kegiatan UMD-KKN Tematik, seperti dalam memilih lokasi, menyediakan data tentang potensi dan masalah pembangunan di kabupaten untuk kemudian menjadi bahan bagi PT dalam memilih tema KKN Tematik mereka. Untuk itu, Pemkab Pangkep menyediakan dukungan biaya operasional Tim Teknis UMD yang beranggotakan 26 orang, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD), staf ahli, dan Tim KOMPAK sendiri.

Pada fase perencanaan, Tim Teknis memulai dengan menyelenggarakan forum pertemuan di kantor Bappeda dengan PT terkait. Tim Teknis kemudian menyampaikan data kondisi pembangunan, termasuk informasi tentang desa, sebagai pertimbangan bagi PT dalam menentukan lokasi dan tema KKN. Tim Teknis juga mengarahkan lokasi KKN Tematik agar tidak tumpang tindih antara jadwal dan lokasi. Tim Teknis juga mengutus para anggota yang tergabung untuk menghadiri pertemuan KKN Tematik di desa, serta mengomunikasikan hasil-hasil KKN Tematik di jajaran Pemkab Pangkep.

Strategi kerja Tim Teknis UMD didasarkan pada cara kerja Bappeda Kab. Pangkep, di mana setiap staf telah dibagi sebagai pendamping pembangunan berdasarkan kewilayahan pembangunan di kabupaten. Untuk urusan musyawarah, perencanaan, hingga evaluasi pembangunan di kecamatan dan desa, sebelumnya telah ditentukan untuk menjadi tanggung jawab setiap pegawai di Bappeda. Tim Teknis UMD diarahkan mengikuti pola ini. Sebagai contoh, seorang Kasubbag Umum dan Administrasi di Bappeda merangkap sebagai fasilitator yang memfasilitasi musyawarah masyarakat desa (MMD) KKN Tematik untuk kecamatan tertentu. Demikian juga dengan Koordinator KOMPAK Kab. Pangkep yang saat itu hadir di MMD KKN Tematik di Desa Benteng sebagai representasi Tim Teknis UMD.



III. POIN PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI

Komitmen dan *buy in* dari pemda dan pemdes sangat penting bagi penyebaran dan keberlangsungan dari model UMD. Hasil pengalaman UMD di Kab. Aceh Barat menunjukkan bahwa pelaksanaan UMD ini masih sangat dipengaruhi dengan dinamika politik lokal. Oleh karena itu, agar model UMD dapat berkelanjutan dan dapat diterima di mana saja, UMD harus bertransformasi menjadi suatu prinsip dan pendekatan pelaksanaan KKN Tematik, dan bukan lagi suatu program yang memiliki *branding* tertentu. Arah perkembangan ini sudah terlihat dari kasus adopsi “UNEJ Membangun Desa” oleh UNEJ—setelah UMD lepas dari KOMPAK—dan potensi mengarusutamakan model dan pendekatan UMD di Kab. Aceh Barat melalui MoU pemda dengan 23 PT di Aceh. Dari kedua kasus ini, meskipun UMD secara program tidak lagi berlanjut, prinsip dan pendekatannya masih berpotensi akan berkembang. UMD dijaga agar menjadi katalisator, tidak menggantikan atau mengambil peran yang sudah ada.

Namun, tingginya animo dari pemda dan pemdes mengenai konsep kemitraan dan kolaborasi tidak serta merta menunjukkan kualitas dari pelaksanaan dan dampak model UMD. Oleh karena itu, keberhasilan KKN dengan model UMD harus didasarkan pada sistem evaluasi yang lebih sistematis berdasarkan data di lapangan. Jumlah MoU antara universitas dengan pemda menjadi indikator performa yang tidak akurat (Kotak 8). Selain itu, UMD-KKN Tematik bukan pengganti atau kompensasi dari rendahnya kapasitas pemda dan pemdes, serta pendamping desa. Dari hasil evaluasi lapangan dan pengumpulan data, efektivitas dan keberlanjutan implementasi program UMD sangat bergantung pada kapasitas pemda dan fasilitator pembangunan untuk secara terus-menerus melibatkan dan berkomitmen untuk menempatkan sumber daya mereka sendiri dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang sudah diinisiasi oleh UMD.

Kotak 8. Legitimasi Nota Kesepahaman (MoU) UMD KKN Tematik

MoU bukanlah produk hukum yang mengikat antara pihak PT dan pemerintah, seperti di Kab. Pangkep. Saat ini, ke-17 PT di Sulawesi Selatan dan Jawa yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan Bupati Pangkep dan tidak mengharuskan semua UMD-KKN Tematik dilaksanakan di Pangkep. Akan tetapi, ada komitmen yang tumbuh dari pihak universitas untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan KKN tematik, meski belum semuanya.

Tujuan MoU sendiri, dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa untuk "...mewujudkan hubungan kerja sama Universitas Membangun Desa melalui penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata tematik di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan." Dalam pasal lain juga disebutkan keinginan agar KKN tematik mampu mendorong desa dan masyarakat menjadi mandiri. Sebagai bentuk tanggung jawab, dalam nota kesepahaman menyatakan, Pemkab Pangkep akan menyiapkan lokasi KKN tematik beserta temanya yang disesuaikan dengan keselarasan keilmuan setiap PT.

Sejak nota kesepahaman ini ditandatangani pada Juli 2019 lalu, sudah ada tiga PT yang menyelenggarakan KKN di bawah koordinasi Tim Teknis, yaitu Universitas Fajar Buana, Universitas Bosowa, dan Universitas Megarezky. Ketiganya adalah PT yang berasal dari luar Kab. Pangkep, yaitu Kota Makassar.

Kendati demikian MoU tidak mengikat secara hukum. Dalam butir nota kesepahaman juga disebutkan tentang otonomi PT dalam pelaksanaan KKN Tematik, termasuk pendanaannya, serta jadwal memulai dan mengakhiri KKN Tematik dan nota kesepahaman yang ditentukan sendiri oleh PT. Sementara ini Pemkab Pangkep melalui Tim Teknis menunggu konfirmasi dan kerja sama pelaksanaan KKN Tematik dari universitas di Kab. Pangkep.

Desain UMD saat ini masih cenderung berangkat dari asumsi bahwa universitas sebagai institusi ilmu pengetahuan dan pembelajaran selalu tahu apa yang harus dilakukan dalam memecahkan masalah pembangunan. Dari hasil evaluasi ini, masih terlihat bahwa masih ada *knowledge* dan *capacity gap* dari pihak universitas mengenai pembangunan desa. Oleh karena itu, bila model UMD ini mau dikembangkan, diperlukan usaha yang lebih sistematis dalam memperkuat, baik secara manajemen maupun secara keilmuan, terutama bagi PT. Beberapa hal yang harus menjadi titik fokus:

- Teknik dan metode penelitian aksi (*action research*) yang baik dan benar, termasuk etika penelitian dan *needs assessment* partisipasi di perdesaan (*participatory rural appraisal*).
- Teknik dan sistem *rigorous monitoring* dan *evaluation* yang terintegrasi dengan kegiatan program, dengan indikator keberhasilan yang objektif dan terukur.
- Prinsip *evidence-based planning*, termasuk menekankan pentingnya *feasibility study* (FS) terhadap program-program *local economic development* (LED) yang didorong oleh model UMD di desa.

Perlu ada pendalaman kembali mengenai konsep pembangunan desa. Saat ini, masih ditemukan kasus konsep LED, Desa Mandiri, dan *One Village One Product (OVOP)* yang digunakan secara tidak tepat dan cenderung tanpa penilaian yang matang dan terencana. Hal ini seperti yang terlihat di desa-desa yang kami kunjungi dapat menyebabkan *isomorphic mimicry*, yaitu kondisi di mana intervensi yang dilakukan hanya mereplikasi secara artifisial proses dari tempat lain (atau dari suatu konsep/praktik baik), tanpa penilaian permasalahan dan kebutuhan yang matang. Kondisi ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan LED di desa-desa UMD yang terlihat bagus dalam jangka pendek, tetapi tidak memberikan hasil yang signifikan dan berkelanjutan. Pelaksanaan model UMD yang tidak kritis terhadap risiko ini dapat menyebabkan pembentukan asumsi yang tidak tepat, atau bahkan berbahaya mengenai konsep pengembangan ekonomi desa atau LED, yang mengedepankan pembangunan infrastruktur besar namun tidak efektif sehingga menghasilkan “gajah putih” yang dijustifikasi dengan legitimasi UMD. Selain menghasilkan inefisiensi sumber daya, pola seperti ini juga dapat melanggengkan patronase politik desa yang banyak memanfaatkan proyek fisik dan infrastruktur besar. Oleh karena itu, UMD harus bisa menempatkan secara proporsional perannya, yaitu sebagai aktor konseptual yang berfokus pada pemenuhan *knowledge gap* yang ada melalui proses analisis dan penelusuran yang empiris dibanding menjadi pihak yang langsung mengikuti “keinginan.”

Pelaksanaan kegiatan UMD-KKN Tematik di masa depan harus mampu bersinergi dengan inisiatif pembangunan lainnya, seperti Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) dan Sistem Informasi Desa (SAID) yang juga diinisiasi oleh KOMPAK. Dalam hal peningkatan kapasitas aparatur desa, KKN tematik model UMD dapat menjadi narasumber bagi kegiatan PKAD. SAID juga dapat digunakan oleh PT dan pemda dalam memetakan daerah yang akan menjadi fokus kegiatan UMD-KKN Tematik dan merencanakan inisiatif kegiatan yang sesuai.

Pengembangan sejumlah kegiatan LED melalui UMD sekaligus menjadi pembelajaran dalam memahami perkembangan BUMDes yang selama ini diharapkan menjadi praktik baik dalam kebijakan pembangunan perdesaan. Konsep mendekatkan desain program UMD serta mengintegrasikan hasil-hasil kegiatan usaha produktif UMD untuk menjadi usaha milik desa seperti di Kab. Aceh Barat dan Pangkep, ternyata membutuhkan berbagai kesiapan. Dalam internal desa di Kab. Pangkep ada BUMDes yang terlihat berhasil dan ada yang masih terkendala kapasitas dari pengurusnya. Namun yang tidak kalah penting adalah faktor kelayakan usaha itu sendiri untuk terus menerus mendapat pembinaan dari pemdes melalui BUMDes, seperti keputusan tiga pemdes di Kab. Aceh Barat yang menghentikan sementara dukungan modal kepada usaha anyaman eceng gondok, karena belum berhasil mengandalkan kegiatan usaha tersebut sebagai salah satu penggerak kehidupan BUMDes.

Kegiatan UMD-KKN Tematik harus mulai mengubah perspektif pendekatan kegiatannya dari kegiatan yang sangat berorientasi pada sektor ekonomi dan fisik, menjadi lebih berfokus pada pembangunan sistem dan perbaikan pelayanan sosial.

Dari hasil diskusi dengan pemda dan temuan tim evaluasi, ada banyak permasalahan yang mendesak namun belum banyak menjadi fokus dari kegiatan KKN tematik, seperti permasalahan perkawinan usia dini di Bondowoso dan permasalahan radikalisme dan ekstrimisme di Aceh, dan beberapa provinsi lainnya secara nasional sebagaimana disampaikan oleh Kemenag dalam studi ini. Isu-isu ini dapat menjadi fokus yang penting bagi kegiatan riset keilmuan dan kegiatan KKN tematik bagi mahasiswa dan desa. Fokus pengembangan keilmuan ini masih sangat penting dan harus menjadi inti dari pelaksanaan KKN tematik. Selain itu, tidak boleh terpinggirkan oleh keinginan atau kebutuhan praktis dari pelaku KKN maupun pihak desa yang saat ini masih sangat bias pada kegiatan yang lebih “terlihat” dan memiliki profil yang lebih tinggi.

Panduan yang bersifat konseptual (mengenai prinsip LED dan pemecahan masalah sosial) dan teknis (mengenai unsur teknis di tingkat manajemen program) sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi proliferasi model ini. Model UMD ini merupakan model yang membutuhkan sumber daya yang intensif dan kemampuan manajerial yang tinggi, baik bagi universitas dan pemda. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu panduan teknis yang tepat guna dan praktis, tidak hanya untuk mahasiswa di tingkat kegiatan, tapi juga bagi universitas khususnya untuk kantor bagian pengabdian masyarakat, seperti LP2M di UIN Ar-Raniry dan UNEJ. Saat ini, buku panduan sudah dibuat oleh UIN Ar-Raniry. Adapun LP2M UNEJ sedang dalam proses penyusunan panduan teknis berdasarkan pengalaman dari kegiatan UMD yang didukung oleh KOMPAK. Pedoman pelaksanaan UMD-KKN Tematik ini harus memiliki fleksibilitas, sehingga memungkinkan bagi PT lain yang telah memiliki konsep tersendiri dalam KKN tematik, tetap masih bisa melanjutkan inovasi mereka tanpa terjadi penyeragaman dan standarisasi yang berlebihan. Mendukung proses penyusunan dan penyebaran panduan ini, dan juga buku panduan yang sudah dibuat UIN Ar-Raniry, dapat menjadi *low hanging fruit* bagi KOMPAK. Termasuk panduan yang akan berasal dari luar PT, seperti oleh Tim Teknis UMD-KKN TEMATIK Pemkab Pangkep juga akan turut menjadi pengayaan pengalaman pengembangan model KKN tematik.

Dalam perspektif manajemen model di KOMPAK, ada beberapa area yang dapat menjadi fokus perbaikan untuk model serupa di masa depan:

- **Memperjelas tujuan akhir dari model UMD menjadi jelas dan terukur.** Dari hasil pengumpulan data evaluasi, terlihat model UMD belum memiliki kejelasan tujuan akhir atau target program. Hal ini didasarkan dari belum adanya *logical framework* program, asumsi *theory of change* dan *key performance indicator* (KPI). Hal ini menyebabkan tujuan dan bentuk UMD masih kurang didefinisikan secara jelas, terutama dalam hal input yang diberikan oleh program dan hasil yang ingin dicapai (*outcome* dan *impact*).

- **Memperkuat proses sistem pemantauan secara rutin dan berkala.** KOMPAK pernah melaksanakan evaluasi pelaksanaan model UMD saat uji coba. Dari hasil evaluasi terlihat bahwa secara implementasi, KKN Tematik model UMD memiliki kelebihan dibanding dengan KKN model biasa dari segi fokus, relevansi terhadap kebutuhan desa dan pemda, dan efek terhadap pembelajaran mahasiswa.⁶
- Memperhatikan beban manajemen program di tingkat daerah. Dari hasil temuan di tingkat daerah, ada indikasi bahwa staf KOMPAK daerah mengalami beban kapasitas yang terlalu besar untuk secara efektif memonitor pelaksanaan UMD ini karena banyaknya program KOMPAK lainnya. Dari hasil kunjungan ke daerah evaluasi, terindikasi bahwa ada kesinambungan yang rendah antara koordinator distrik sekarang dengan koordinator sebelumnya yang lebih banyak berperan dalam masa inisiasi dan uji coba dibandingkan dengan koordinator saat ini yang lebih banyak fokus pada perluasan dan keberlanjutan KKN model UMD.



Musyawarah Masyarakat Desa KKN Desa Benteng, Kab. Pangkep

⁶ KOMPAK, 2016. *Laporan Internal Evaluasi Universitas Membangun Desa (UMD)*.



Lampiran 1.

Kondisi Implementasi Kegiatan KKN Tematik Model UMD di Daerah

1. Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh

1.1. Kondisi umum

Program KKN tematik oleh UIN Ar-Raniry di Kab. Aceh Barat yang didukung oleh KOMPAK memilih tema kegiatan penguatan ekonomi produktif, yaitu kerajinan eceng gondok. Untuk itu dalam program UMD ini, KOMPAK mendukung para pengrajin dengan kemampuan teknik penganyaman hingga pemasaran dengan mendatangkan sejumlah ahli kerajinan anyaman untuk melatih masyarakat, termasuk menyelenggarakan expo produk-produk anyaman. Kegiatan UMD-KKN Tematik ini dianggap sangat positif oleh pemda setempat, meski dalam internal UIN Ar-Raniry, program ini belum berhasil dilembagakan lebih kuat oleh pihak LP2M kendati kegiatan ini memiliki dokumentasi yang cukup baik. Pada penghujung program, Tim UMD mendokumentasikan pengalaman tersebut dalam Buku Panduan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Inovatif Universitas Membangun Desa, yang didukung pencetakannya oleh KOMPAK. Demikian juga dengan usaha kerajinan anyaman yang dinilai sangat menurun. Kegiatan ini tidak lagi mendapat dukungan yang memadai oleh pemdes dan Pemkab Aceh Barat. Pemdes menilai usaha ini masih sulit berkembang, sementara di tingkat kabupaten juga dihadapkan pada menurunnya dukungan setelah terjadi pergantian kepala daerah pada Pilkada 2017 lalu. Selain itu, pilihan jenis kerajinan anyaman ternyata menghadapi kendala sejak dari proses teknis produksi hingga pemasaran produk.

Saat ini ada upaya yang sedang berjalan di tingkat provinsi yang juga didukung oleh Tim Inovasi KOMPAK, yaitu memperkuat konsep Konsorsium PT untuk Penanganan Kemiskinan dengan memfasilitasi keterlibatan PT mendukung strategi kerja Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K). Pengalaman KKN tematik di Arongan Lambalek diklaim oleh Tim UMD UIN Ar-Raniry menjadi inspirasi bagi pembentukan forum ini, sehingga telah dilakukan penandatanganan MoU antara 23 PT di Aceh dengan TKP2K untuk membantu pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di Aceh.

1.2. Temuan aspek teknis dan kemitraan

Sejak dimulai tahun 2016, UMD-KKN Tematik di Aceh telah diarahkan untuk menjadi salah satu strategi pengentasan kemiskinan dan menempatkan ide UMD-KKN Tematik ini ke dalam bingkai kerja sama antara dunia ilmu pengetahuan dan kebijakan (*knowledge to policy*). Pemerintah, terutama Bappeda Provinsi Aceh menilai model UMD oleh PT dapat menjadi salah satu proses untuk merangkaikan antara kegiatan penelitian etnografis mengenai penyebab permasalahan kemiskinan dan kegiatan KKN tematik yang bersifat praktis dan konkret untuk menawarkan alternatif penanggulangannya. Etnografi kemiskinan yang dilakukan oleh Bappeda Aceh menjadi bagian dari kegiatan pra-UMD-KKN Tematik yang dilakukan oleh LP2M UIN Ar-Raniry. Kajian tersebut menemukan bahwa tumbuh suburnya eceng gondok mengakibatkan kawasan yang kemudian menjadi lokasi KKN di Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat tersebut sering tergenang banjir. Banjir ditemukan mengakibatkan terganggunya kegiatan ekonomi masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai petani dan juga menurunkan kualitas lingkungan hidup mereka sehingga dilihat sebagai faktor penyebab kemiskinan. Berangkat dari hasil penelitian tersebut, UIN Ar-Raniry memfokuskan kegiatan UMD-KKN Tematik mereka dengan mengembangkan industri kerajinan lokal berupa anyaman menggunakan bahan baku eceng gondok.

Secara kelembagaan UIN Ar-Raniry telah memiliki kapasitas yang cukup untuk menyelenggarakan KKN tematik UMD. Berbekal pelatihan "Fasilitasi Sosial" dan "Mapping Aktor dan Kondisi Sosial" di desa, mahasiswa diterjunkan sebanyak tiga gelombang ke kawasan yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, yaitu di Kec. Arongan Lambalek, Kab. Aceh Barat hingga tahun 2017. Pihak PT menilai kegiatan tersebut dipandang baik oleh warga desa, berdampak positif serta sesuai dengan harapan yang dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berpartisipasi dalam kegiatan UMD diharapkan dapat membuka wawasan mahasiswa terhadap permasalahan sosial dan mencoba bekerja untuk membantu menyelesaikannya. Melalui interaksi dengan warga desa, pengurus LP2M berharap mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu yang didapatkan di kelas, mengasah keterampilan komunikasi, dan membangun relasi dengan dosen maupun mahasiswa lainnya.

Pelaksanaan KKN tematik model UMD di Aceh ini telah menunjukkan adanya model saling belajar dan membangun kemitraan. Sejak dari pelatihan penganyaman hingga pemasaran hasil produk anyaman desa-desa di Kec. Arongan Lambalek, program industri kerajinan anyaman eceng gondok telah menunjukkan adanya pola kolaborasi kemitraan yang luas. Dengan dukungan KOMPAK, UIN Ar-Raniry mendatangkan pelatih anyaman dari Yogyakarta untuk melatih masyarakat membuat berbagai jenis produk anyaman dengan variasi yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. KOMPAK juga turut membantu mencari peluang pasar bagi pengrajin agar hasil produksi mereka dapat ditampung secara lebih luas. Termasuk membuka kemungkinan untuk menyuplai produk mereka ke retail besar seperti IKEA, meskipun saat ini masih terkendala oleh kualitas produk sehingga kemitraan dengan IKEA ini mengalami kondisi yang tidak pasti.

Model UMD-KKN Tematik di Kab. Aceh Barat yang mengangkat tema penanggulangan kemiskinan ternyata menghadapi kendala terutama dalam penyusunan strategi pengembangan industri lokal. Dari hasil evaluasi tim, semangat untuk "memanfaatkan sampah menjadi uang" dapat dilihat belum diikuti oleh kajian kelayakan terhadap kegiatan usaha produktif yang diusulkan. Meski bahan baku yang akan diolah mudah ditemukan, tapi untuk menghasilkan satu produk anyaman cukup membutuhkan waktu, dana, dan tenaga. Demikian juga setelah produk anyaman tersebut diproduksi, para pengrajin juga dihadapkan pada harga pasar yang kurang menguntungkan mereka, jumlah pembeli yang masih terbatas, termasuk kualitas produk yang masih harus ditingkatkan. Hasilnya, saat studi evaluasi ini dilakukan hanya tinggal satu keluarga yang bertahan sebagai pelanjut usaha anyaman sebagai usaha keluarga. Kegiatan memproduksi anyaman eceng gondok masih membutuhkan banyak modal dan dukungan untuk maju, terutama untuk dijadikan jaminan bahwa usaha UKM Kerajinan Tangan Kreatif Kubu dapat memberdayakan para warga lainnya (Kotak 9).



Kelompok Anyaman Pandan di Desa Pelanteu, Kab. Aceh Barat



Pengrajin Anyaman Desa Kubu, Kab. Aceh Barat

Kotak 9. Kegiatan Ekonomi Kreatif Anyaman Eceng Gondok

Pemerintah Kab. Aceh Barat telah bekerja sama dengan PT melalui program UMD- KKN tematik sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan. Bersama mereka mendorong pengolahan eceng gondok menjadi produk yang berharga di pasaran dan memberi keuntungan ekonomi kepada masyarakat di Kec. Arongan Lambalek.

Sejak awal, produk anyaman eceng gondok diproyeksikan dapat dipasarkan secara luas sehingga melalui dukungan KOMPAK pihak UIN Ar-Raniry mendatangkan pelatih anyaman dari Yogyakarta, termasuk dukungan peralatan pengolahan dari pemkab dan provinsi. Namun, hingga saat ini usaha tersebut masih menemui kesulitan. Semua upaya promosi dan pemasaran yang telah dibantu belum mampu menjadikan usaha tersebut solusi perekonomian masyarakat di sana. Semua pihak baru menyadari setelah rencana terlaksana di lapangan sehingga Bappeda Kab. Aceh Barat menilai usaha tersebut sebenarnya membutuhkan supplier yang dapat membeli langsung produk tersebut dari masyarakat. Metode konsinyasi yang ada saat ini belum banyak memberi keuntungan kepada pekerja. Akibatnya banyak di antara mereka yang kembali ke pekerjaan awal sebagai buruh tani dan menjalankan usaha kecil lainnya.

Situasi tersebut membuat pemerintah di ketiga desa berhenti mendanai kegiatan ini, setelah sekali pernah pada 2017 atas arahan Bupati mengalokasikan APB Desa masing-masing sebesar 50 juta rupiah untuk kegiatan kerajinan anyaman. Hingga saat ini BUMDes di setiap desa juga belum menjadikan usaha ini sebagai andalan untuk dikelola. Dengan demikian, studi ini juga menilai bahwa dalam rangkaian kegiatan UMD-KKN Tematik yang memilih tema ekonomi produktif, penting untuk melakukan kajian kelayakan usaha terlebih dahulu.

Mak Lut, perempuan berusia 49 tahun dari Desa Pelanteu menghitung keuntungan yang layak mereka peroleh saat ini adalah sepertiga dari harga penjualan produk. Dia menceritakan, bahwa memproduksi anyaman membutuhkan waktu, terutama sejak memungut bahan baku dari sungai dan menjemur hingga kering dengan mengandalkan sinar matahari selama 5–10 hari. Setelah itu, mereka butuh waktu kira-kira lima hari untuk menganyamnya. Setiap pekerja hanya mampu menghasilkan 4–5 produk berukuran kecil setiap hari, kira-kira penghasilan mereka hanya Rp20.000 per hari. Itu pun setelah menunggu barang terjual, lantaran mereka belum berada dalam sistem “Bapak Angkat.” Untuk hasil yang lebih mendukung, maka produksi ini masih membutuhkan banyak dukungan di luar pelaksanaan model UMD-KKN Tematik yang telah berjalan.

Secara umum keberlanjutan UMD di Aceh terkendala dukungan politik dan kapasitas aparatur pemerintahan di daerah dalam memberikan dukungan pada program yang diinisiasi oleh KKN tematik UMD.

Pada awalnya kepala daerah dan jajarannya di Pemkab Aceh Barat sangat mendukung program UMD-KKN Tematik yang diinisiasi oleh KOMPAK, termasuk mendorong pemerintah di ketiga desa mengalokasikan dana desa untuk mendukung kerajinan anyaman eceng gondok. Namun saat terjadi pergantian kepala daerah dan jajarannya saat Pilkada tahun 2017, semua dukungan terhadap program KKN dan juga minat untuk terus bekerja sama dengan PT untuk melaksanakan KKN tematik ini menjadi hilang, termasuk tidak ada lagi dorongan kepada pemdes untuk mencari solusi pendanaan serta pemasaran produk hasil anyaman masyarakat. Meski demikian menurut Kepala Bappeda dan koordinator KOMPAK Kab. Aceh Barat, program UMD-KKN Tematik masih memiliki tempat dalam politik pembangunan saat ini. Misi ke-III Pemkab Aceh Barat saat ini berbunyi "Mulai Membangun dari Desa." Dengan demikian, pembangunan desa masih menjadi salah satu fokus serta andalan Pemkab. Aceh Barat.

Pengalaman UMD tersebut kemudian tidak dilanjutkan dengan pengembangan konsep pelaksanaan KKN tematik di internal UIN Ar-Raniry.

Kapasitas sumber daya dan sumber dana LP2M terlihat menjadi kendala utama berhentinya pengembangan KKN tematik di UIN Ar-Raniry. Selain itu juga, tidak terdapat dorongan yang seharusnya diberikan oleh pimpinan universitas berdasarkan hal-hal positif dari pengalaman pelaksanaan model UMD-KKN Tematik. Sejak dilaksanakannya model UMD-KKN Tematik, telah tiga kali terjadi pergantian kepengurusan di LP2M. Namun, pengalaman dari pengurus sebelumnya sulit untuk dilanjutkan oleh pengurus yang baru. Demikian juga dengan dukungan eksternal yang pernah ada, saat itu lantaran pernah memilih memperkuat kegiatan ekonomi produktif selama pelaksanaan ujicoba UMD-KKN Tematik maka menurut pengurus LP2M saat ini, mereka tidak mampu membiayai sendiri KKN tematik dengan anggaran yang terbatas. Sebagai indikasi mereka masih tertarik dengan ide KKN tematik, tahun 2019 lalu mereka masih menerima kerja sama dengan Tim KOMPAK Aceh untuk menerjunkan mahasiswa KKN dengan tema penanggulangan *stunting* di Kab. Bener Meriah. Namun atas kekurangan biaya dari LP2M, pihak KOMPAK juga mengakui persiapan yang matang juga masih terkendala, seperti pemberian pelatihan dan sekaligus memaknai pentingnya mempersiapkan mahasiswa sebelum diterjunkan ke lapangan oleh LP2M. Ke depan pihak KOMPAK menurut LP2M berinisiatif menggandeng UIN Ar-Raniry untuk melaksanakan KKN tematik di kabupaten yang sama dengan tema pengolahan pakan ternak berbahan baku ampas kulit kopi. Kembali menurut pihak LP2M, mereka mengajukan dukungan tambahan pendanaan dari KOMPAK. Pihak LP2M terlihat sudah memahami, terutama terkait relevansi tema KKN dengan disiplin keilmuan mahasiswa. Belajar dari tema *stunting* tahun lalu menurut mereka hal itu memberatkan mahasiswa. Dengan disiplin keilmuan yang berbeda dari kalangan UIN dan juga persediaan keuangan yang terbatas, membuat mereka merasa belum mencapai hasil yang memuaskan. Beruntungnya saat itu mahasiswa masih diberi nilai KKN baik oleh Pemkab.

Setelah diskusi konsep UMD-KKN Tematik terhenti di internal UIN Ar-Raniry, pelibatan PT dalam pembangunan di Aceh semakin dilanjutkan ke arah strategi penanggulangan kemiskinan. Pemprov Aceh masih melakukan inovasi kerja sama antarpemangku kepentingan seperti pembentukan konsorsium antaruniversitas untuk membantu penanggulangan kemiskinan (Kotak 10). Kendati pada fase baru-baru ini KOMPAK pernah menggandeng LP2M UIN Ar-Raniry untuk menerjunkan mahasiswa KKN dengan tema penanggulangan *stunting* di Kab. Bener Meriah, tetapi ini tidak didasarkan pada pembelajaran UMD-KKN Tematik sebelumnya. Semua kendala yang dikeluhkan oleh pengurus LP2M yang baru masih pada seputar mencari jalan keluar, meski di satu sisi mereka sudah mulai memahami tentang manfaat KKN tematik.

Kotak 10. Rakor Kemiskinan dan MoU 23 PT

Menurut anggota Tim UMD awal UIN Ar-Raniry, sejak bergulirnya model UMD di Kab. Aceh Barat tahun 2016, mereka telah berkomunikasi dengan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Aceh, yang sekretariatnya berada di Bappeda Prov. Aceh. Setidaknya dalam dua tahun terakhir (2018–2019), menurut mereka pengalaman UMD di Kab. Aceh Barat selalu dijadikan pembelajaran untuk disampaikan dalam rapat koordinasi tahunan penanggulangan kemiskinan Aceh.

Pada 2019, TKP2K dengan dukungan KOMPAK melanjutkan inisiatif pelibatan PT dalam penanggulangan kemiskinan. Mantan anggota tim pelaksana UMD UIN Ar-Raniry yang dinilai berpengalaman dengan UMD diberi peran untuk menyusun konsep kerja bernama “Konsorsium Perguruan Tinggi dalam Penanggulangan Kemiskinan Aceh”, yang kemudian dibantu sempurnakan oleh KOMPAK untuk dibukukan. Ide konsorsium ini terlihat menjadi agenda utama Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Aceh oleh TKP2K pada 3 Desember 2019 lalu yang menghadirkan 23 perwakilan PT di Aceh. Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan MoU antara PT dan Pemprov Aceh dalam penanggulangan kemiskinan.

Pengalaman UMD KKN sebagaimana juga diklaim oleh Tim UMD UIN Ar-Raniry telah menginspirasi MoU tersebut. Terlihat juga dalam buku “Pedoman Konsorsium Perguruan Tinggi dalam Penanggulangan Kemiskinan” memuat pengalaman KKN tematik UIN Ar-Raniry. Secara spesifik juga ada bagian yang menekankan KKN tematik sebagai instrumen kerja konsorsium. Dari pihak UIN Ar-Raniry saat itu yang hadir untuk melakukan penandatanganan MoU adalah Wakil Rektor III, meski tanpa menyertakan pengurus LP2M yang saat itu belum mengetahui perkembangan ide konsorsium.

Secara konseptual dan teknis pelaksanaan, perspektif GESI dalam pelaksanaan model UMD di Aceh telah menjadi arus utama. UIN Ar-Raniry sejak awal telah menempatkan GESI sebagai salah satu prinsip utama dalam desain kegiatan pilot UMD. Hal ini terlihat dari konten isi buku “Panduan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Inovatif Universitas Membangun Desa” yang memberikan perspektif GESI secara komprehensif (Kotak 4). Dalam desain kegiatannya, UIN Ar-Raniry juga telah menargetkan perempuan sebagai pelaku utama kegiatan usaha produktif yang dirancangnya.

- **Dalam pelaksanaannya ternyata penerapan prinsip GESI menemui sejumlah kendala di tengah masyarakat.** Ada beberapa kondisi yang menyebabkan prinsip-prinsip GESI belum maksimal memberikan keuntungan, terutama bagi perempuan dalam implementasi kegiatan yang diinisiasi oleh UIN Ar-Raniry, yaitu: Karakter usaha ini sangat membutuhkan intensitas fisik, terutama mencari dan mengangkut bahan baku eceng gondok dari sungai. Awalnya peran itu dibagi untuk dilakukan bersama laki-laki. Namun karena usaha ini belum menunjukkan keuntungan yang baik, banyak laki-laki yang tidak mau terlibat lagi lantaran harus melakukan pekerjaan lain. Dengan kondisi itu jumlah kelompok usaha yang berproduksi menjadi berkurang. Dalam kasus ini, para perempuan yang ditemui mengaku banyak yang mengurungkan niat mengumpulkan eceng gondok di sungai karena takut terkena gigitan lintah. Selain itu juga, mereka belum mampu untuk mengorganisasi proses pengumpulan yang membutuhkan dukungan kendaraan roda dua atau empat untuk pengangkutan.
- Situasi ini juga diterangkan bagaimana desain GESI yang menyasar perempuan dalam program ini, tetapi kemudian harus menyesuaikan dengan realitas ekonomi. Warga mengatakan bahwa kondisi perekonomian di daerah mereka saat ini masih membuat laki-laki cenderung mengerjakan pekerjaan di luar yang jauh dari rumah, seperti berkebun, berladang, menjadi sopir, atau yang lebih membutuhkan tenaga, seperti bertukang. Tidak hanya laki-laki, bahkan banyak perempuan juga ada yang mengikutinya. Untuk itu, karena penghasilan yang menurut mereka rendah saat menekuni usaha anyaman, maka puluhan perempuan yang telah dilatih akhirnya ada yang memilih kembali bekerja di ladang milik perkebunan yang relatif berat. Akan tetapi, bagi mereka itu sudah biasa asal dapat menghasilkan upah secara harian.
- Dengan adanya desain pembagian peran antara perempuan dan laki-laki dalam program— sebagaimana juga tertulis dalam langkah ketiga desain program dalam buku panduan UMD—menunjukkan bahwa tema ekonomi ini layak bagi perempuan. Namun karena dihadapkan pada pilihan mana yang lebih menguntungkan, maka sejumlah perempuan, seperti di Gampong Pelanteu menyebutkan, “Karena usaha eceng gondok belum berhasil, ada yang kembali lanjut menganyam pandan. Selain itu, ada juga ada yang membuat *u suleu* (sejenis bahan makanan olahan yang berbahan baku kelapa) dan kue-kue untuk dijual.”
- Untuk sementara waktu masyarakat masih mencari inovasi dari sisi usaha agar anyaman eceng gondok layak sebagai alternatif mata pencaharian yang menguntungkan.

2. Kab. Bondowoso, Prov. Jawa Timur

2.1. Kondisi Umum

Kegiatan KKN tematik menggunakan model UMD di Kab. Bondowoso dimulai pada 2016 oleh UNEJ. Kegiatan ini dimulai dengan pilot proyek penguatan informasi desa di 10 desa yang dinamakan program SAID. Program ini berupa pembangunan sistem informasi desa yang dapat membantu pelayanan administrasi kependudukan desa, beserta sistem pelayanannya. Pelaksanaan UMD-KKN Tematik UNEJ di Bondowoso dianggap berhasil oleh pemda. Oleh karena itu pada 2016, pemkab mengeluarkan regulasi untuk mengadopsi program SAID UNEJ dengan memasukkan regulasi pendanaan desa untuk mendukung pengadaan internet menggunakan Dana Desa. Tahun 2017 pemkab mereplikasi program SAID ini di 67 desa, yang kemudian dilanjutkan lagi tahun 2018 hingga mencapai 160 desa dari 209 desa yang ditargetkan.

Selain program SAID, program lainnya adalah pendampingan BUMDes yang dilakukan di beberapa desa di Bondowoso, termasuk pengembangan usaha industri *virgin coconut oil* (VCO) dan pengembangan daerah wisata. Namun dari hasil evaluasi lapangan, program-program ini tidak ada yang berlanjut ataupun menunjukkan hasil yang efektif. Saat ini UNEJ masih melanjutkan kegiatan KKN tematik menggunakan model UMD, yang kemudian diadopsi oleh UNEJ menjadi "UNEJ Membangun Desa." Perubahan ini diambil setelah akan berakhirnya kerja sama dan dukungan KOMPAK terhadap pengembangan model UMD dalam pelaksanaan KKN.

2.2. Temuan Aspek Teknis dan Kemitraan

- **Ada komitmen yang tinggi dari Pemkab Bondowoso pada model UMD yang dilakukan oleh UNEJ.** Pemkab Bondowoso melihat kemitraan dengan universitas melalui model UMD sangat berguna sebagai proses pemecahan masalah yang konkret, bukan hanya sebatas kajian sehingga sangat penting dalam membantu kinerja pemda. Pejabat Pemkab Bondowoso menyebut bahwa pemkab masih memiliki "ruang kosong teknis" di mana pemda mengetahui permasalahan secara konseptual dan strategis, tetapi tidak dapat menerjemahkan ke dalam kegiatan yang praktis dan mampu memecahkan masalah. Dalam hal ini, UMD dianggap sebagai salah satu mekanisme yang efektif dan efisien dalam mengisi kebutuhan ini.
- **UNEJ sudah memiliki kapasitas yang tinggi dalam manajemen penyelenggaraan KKN tematik UMD.** Saat ini UNEJ sudah memiliki sistem pengabdian masyarakat yang mengombinasikan KKN mahasiswa sebanyak dua kali dalam setahun (Januari dan Agustus) dengan program pengabdian dosen, yang diadakan di sela-sela masa pelaksanaan KKN. Kapasitas ini adalah hasil dari pengalaman penyelenggaraan UMD dengan dukungan KOMPAK. Melalui pengalaman ini, UNEJ sedang menyusun buku "UNEJ Membangun

Desa” yang akan mengelaborasi prinsip-prinsip UMD, tetapi belum sampai pada petunjuk teknis. UNEJ menargetkan akan ada dua panduan, di tingkat manajemen program dan modul pelaksanaan teknis di lapangan.

- **Pengalaman dari menjalankan UMD dengan KOMPAK membuat LP2M UNEJ memiliki kapasitas dan *mindset* yang lebih kreatif dalam menggali dan memanfaatkan potensi kemitraan lintas pihak.** Kepala LP2M UNEJ menyatakan, “Kalau dulu kita selalu berpikir kapasitas anggaran yang tersedia itu yang kita gunakan. Sekarang, ruang-ruang mana yang bisa kita munculkan, misalnya tahun ini untuk pembekalan dosen pembimbing lapangan (DPL) dengan dosen, kita menangkap isu strategis dan kita berbicara dengan mitra, apakah ada slot yang bisa digunakan.” Kemitraan multipihak, terutama dengan pemerintah pusat, dunia usaha, dan lembaga pembangunan internasional menjadi prinsip utama pelaksanaan UNEJ Membangun Desa. Dengan demikian, dapat memaksimalkan semua sumber daya alternatif yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan KKN tematik yang lebih efektif.
- **Faktor utama keberlanjutan dan pengembangan model UMD dalam KKN tematik oleh UNEJ adalah adanya dukungan yang kuat dari kepemimpinan universitas, dan adanya integrasi UMD dengan rencana strategis universitas.**
 - Rektor UNEJ juga melihat UMD sebagai pendekatan yang strategis dalam usaha *branding* UNEJ sebagai universitas yang terdepan dalam membangun kemitraan dengan pemda dan masyarakat dan berkontribusi pada usaha pembangunan yang konkret. Keahlian dalam KKN tematik menggunakan model UMD ini menjadi *competitive advantage* UNEJ dalam membangun reputasi universitas di dunia akademik dan dalam menarik minat calon-calon mahasiswa baru.
 - UNEJ juga sedang terus membangun sistem pendekatan UMD yang diselaraskan dengan program pengabdian dosen sehingga dapat turut meningkatkan *output* karya ilmiah dan penelitian dosen.
- **Di Kab. Bondowoso, beberapa desa yang menjadi desa dampingan UNEJ dan KOMPAK sudah memiliki kapasitas yang cukup dalam memfasilitasi kegiatan KKN tematik dengan model UMD.** Namun kapasitas desa sangat bervariasi. Di Desa Cerme dan Glingseran, kemampuan kedua desa untuk mendukung dan memanfaatkan kegiatan UMD sangat dipengaruhi oleh pendampingan KOMPAK yang cukup intensif. Melalui pembinaan dari KOMPAK dan UNEJ, kapasitas dari pemdes untuk secara efektif memanfaatkan potensi kemitraan yang ada sangat meningkat, demikian pula dengan kapasitas finansial. Kedua desa ini menggunakan sumber daya APB Desa yang dimiliki untuk merealisasi program SAID dan pengembangan daerah wisata.

■ **Dari sisi efektivitas, KKN tematik di Kab. Bondowoso menggunakan model UMD memperlihatkan hasil yang bervariasi.**

- Program SAID di Desa Cerme menghasilkan pusat pelayanan administrasi desa yang efektif. Pusat pelayanan digital di Desa Cerme saat ini sudah memiliki ruangan sendiri dengan tempat tunggu dan komputer yang selalu terhubung internet. Permohonan surat menyurat sudah mampu dilakukan langsung secara daring melalui desa. Selain itu, sistem komputer desa sudah terkoneksi dengan basis data terpadu (BDT) yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan desa, meskipun saat ini belum pernah digunakan. Secara umum, dapat dilihat bahwa program SAID ini menunjukkan *output* yang cukup efektif.
- Kondisi yang berbeda ditemukan di Desa Glingseran. Di Glingseran misalnya, kegiatan UMD sebagian besar berfokus pada pengembangan kawasan wisata untuk menjadikan Glingseran sebagai desa wisata. Berdasarkan pengamatan dan observasi tim evaluasi, usaha tersebut menghasilkan area wisata yang tidak terawat dan mendapatkan sedikit sekali pengunjung, berakhir sebagai proyek “gajah putih” (Kotak 3).

■ **Dari sisi keberlanjutan, program-program KKN di Kab. Bondowoso masih terkendala kapasitas implementasi.**

- Program SAID menunjukkan keberlanjutan yang cukup baik, meskipun ada masalah yang bersifat teknis yang menunjukkan tantangan keberlangsungan program KKN. Di Desa Cerme, terjadi permasalahan migrasi server antara UNEJ dengan server milik pemda dalam program SAID. Saat ini portal SAID di bawah server pemda, tetapi menyebabkan *interface* SAID milik UNEJ menjadi tidak berjalan. Di saat yang sama, desa masih mengandalkan UNEJ untuk memberikan dukungan teknis. Kasus lain yang dialami adalah setelah UNEJ membangun sistem pelayanan, surat menyurat desa berbasis digital, pemda mengeluarkan program yang serupa sehingga sistem yang dibangun oleh UNEJ menjadi tidak terpakai.
- Di Desa Glingseran, saat ini daerah wisata yang dibangun secara efektif sudah tidak berjalan. Jumlah kepala keluarga yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) tersisa delapan kepala keluarga. Dari pengakuan kepala desa sendiri, daerah wisata ini sudah hampir tidak menghasilkan pemasukan lagi bagi desa karena tidak ada pengunjung. Meskipun begitu, Desa Glingseran masih menerima pendanaan untuk daerah wisata ini yang saat ini digunakan untuk membangun musala dan gapura besar di jalan utama menuju desa (Kotak 3). Kondisi ini menyebabkan adanya potensi pemborosan dan investasi yang tidak tepat di Desa Glingseran.

- **Dari hasil pengamatan, GESI belum menyentuh dan menjadi arus utama program-program KKN oleh UNEJ di Kab. Bondowoso.** Dari dokumen perencanaan awal dan dari wawancara di lapangan, pelaksanaan KKN oleh UNEJ belum mengadaptasi prinsip GESI. Misalnya *participatory rural assessment* (PRA) yang dilakukan belum dilakukan secara terpisah antara laki-laki dan perempuan. Dari sisi petunjuk teknis, belum ada dokumen pelaksanaan yang menunjukkan adanya bukti bahwa GESI telah menjadi arus utama dalam KKN UNEJ.
- **Pemda masih banyak bergantung pada pola *business as usual* yang sering kali tidak cocok dengan pendekatan yang inovatif dan cepat yang diinginkan oleh universitas.** Selain itu, bentuk komitmen praktisnya sangat terbatas karena mata anggaran yang dimiliki oleh pemda yang bisa digunakan oleh universitas adalah dalam bentuk kajian, bukan dalam bentuk aktivitas. Di saat yang sama, universitas memiliki komitmen dan sumber daya yang terbatas untuk dapat secara intensif melakukan pendampingan dan implementasi program, terutama ketika program KKN sudah berakhir.
- **Setelah berakhirnya pilot UMD 2016–2017 yang didukung oleh KOMPAK, belum ada lagi kelanjutan kerja sama antara UNEJ dan Pemkab Bondowoso di luar komitmen kemitraan pemda di 10 desa binaan.** Beberapa penyebab hal tersebut adalah:
 - UNEJ menyangkan bahwa pemda tidak mampu memberikan komitmen seperti pada saat pelaksanaan program pilot KKN model UMD. Dukungan oleh pejabat tinggi pemda tidak tecermin selama implementasi aktual UMD. Pejabat UNEJ yang mengatur UMD menganggap kemitraan oleh pemda Kab. Bondowoso dan Pangkep masih terbatas pada komitmen di tingkat pejabat tinggi.
 - Kurangnya kapasitas dan dukungan dari pemda dalam mengisi peran universitas di luar siklus KKN, di mana pemda masih dianggap bekerja dengan pendekatan *business as usual*.
 - Potensi *crowding out* terjadi dengan inisiatif lain yang dibuat oleh pemda bekerja sama dengan KOMPAK, seperti program TAPEMANIS. UNEJ mengklaim bahwa mereka kurang mampu untuk berkoordinasi dengan inisiatif yang baru ini.
 - Secara institusional, belum ada wadah formal di mana Pemkab Bondowoso dan universitas bisa berkoordinasi untuk menyelaraskan aktivitas masing-masing stakeholder. Komitmen dan koordinasi hingga saat ini masih banyak bersifat *person to person*, seperti hubungan baik Rektor UNEJ dan pejabat LP2M dengan dengan pejabat Pemkab Bondowoso.

3. Kab. Pangkep, Prov. Sulawesi Selatan

3.1 Kondisi umum

Ekspansi UMD-KKN Tematik ke Kab. Pangkep awalnya difasilitasi oleh tim KOMPAK Jakarta dengan mempromosikan pembelajaran dari pengalaman UNEJ, yang kemudian disambut oleh Pemkab Pangkep sebagai salah satu wilayah kerja KOMPAK di Prov. Sulawesi Selatan. Hal ini merupakan tindak lanjutnya dari diawali pertemuan Kepala Bappeda Pangkep dengan pihak UNEJ saat workshop SDGs di Jakarta. Pihak LP2M UNEJ dengan difasilitasi oleh KOMPAK kemudian melakukan kunjungan ke Pangkep. Setelah itu, UNEJ melakukan persiapan UMD-KKN Tematik mahasiswa bidang kepariwisataan, kewirausahaan, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke desa Bulu Cindea.

Bappeda Kab. Pangkep dan KOMPAK saat itu mengundang LP2M UNEJ melakukan serangkaian promosi keliling ke sejumlah PT di Makassar untuk berbagi pengalaman tentang KKN tematik. Untuk memperkuat pengalaman ini, Pemkab Pangkep yang dimotori langsung oleh Bupati menyelenggarakan MoU UMD-KKN Tematik Pemkab Pangkep dengan mengundang 17 PT, termasuk juga UNEJ (Terlampir salinan MoU dengan UNEJ). Untuk melaksanakan KKN model tematik ke depannya, Pemkab Pangkep telah membentuk Tim Teknis UMD-KKN Tematik yang diketuai oleh Bappeda Kab. Pangkep, DPMD sebagai Sekretaris, dan Bupati sebagai penanggung jawabnya. (Terlampir salinan SK Tim Teknis UMD-KKN Tematik Kab. Pangkep).

3.2. Temuan aspek teknis dan kemitraan

Sejak program KKN tematik model UMD diperkenalkan oleh KOMPAK, Pemkab Pangkep sudah memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap peran PT dalam mengatasi persoalan pembangunan di daerah. Belajar dari UMD-KKN Tematik yang pernah dilaksanakan mahasiswa UNEJ di Desa Bulu Cindea, Pemkab Pangkep melihat bahwa UMD-KKN Tematik berperan penting dalam pembangunan desa yang saat ini memiliki dana serta kewenangan yang besar. Oleh karena itu, Pemkab ingin kegiatan KKN lebih fokus dibandingkan model KKN sebelumnya, yang hanya tinggal dan berbaur dengan masyarakat desa. Menurut Kepala Bappeda, "Kami tidak mampu melahirkan loncatan pembangunan, tapi melalui program-program seperti UMD ini kami merasa ada loncatan."

Pengalaman UMD-KKN Tematik di Kab. Pangkep sejauh ini menunjukkan kesesuaian dengan konteks masyarakat serta keberlanjutannya, terutama bagi PT dalam melihat peluang penguatan pembangunan desa. Indikasi ini tampak pada sejumlah hal yang sudah berkembang di lapangan, yaitu:

- Program pengembangan pariwisata, kewirausahaan, dan pembenahan sistem administrasi dan pelayanan kantor desa oleh mahasiswa UNEJ di Desa Bulu Cindea dinilai oleh Pemkab serta pemdes telah tepat dengan potensi dan kebutuhan desa.

- Demikian juga dengan penanganan terhadap isu-isu kesehatan di Desa Pitue dan Bulu Cindea oleh mahasiswa Universitas Megarezky, yang juga dianggap sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dihadapi warga.
- Tim Teknis UMD-KKN Tematik juga mengakui bahwa kegiatan KKN telah membantu Pemkab, seperti melakukan validasi data-data kependudukan dan penghitungan angka balita *stunting*.
- Universitas Fajar, Makassar, selain berkomitmen untuk terus melaksanakan KKN tematik di Kab. Pangkep juga berhasil mengidentifikasi kebutuhan peningkatan sumber daya desa. Dari hasil KKN tematik, Universitas Fajar menyodorkan proposal kerja sama untuk membuat program sekolah teknik desa kepada Tim Teknis. Sekolah ini akan bersertifikasi untuk para aparatur pemerintah desa. Dengan demikian, dapat meningkatkan efisiensi pembangunan desa yang lebih efisien dengan adanya tenaga teknik desa yang terlatih.

Pengalaman pelaksanaan UMD-KKN Tematik oleh UNEJ menjadi dasar pembuatan MoU antara Pemkab Pangkep dengan sejumlah PT untuk menyelenggarakan KKN tematik menggunakan model UMD. MoU tentang KKN tematik di Kab. Pangkep ini terbukti mampu mendorong semangat dan koordinasi antara perguruan tinggi. Saat ini, tiga perguruan tinggi di Sulawesi Selatan telah berkoordinasi dengan Tim Teknis untuk menyelenggarakan KKN Tematik di Kab. Pangkep, dengan bidang keilmuan yang berbeda-beda. Di desa evaluasi, yaitu Desa Bulu Cindea, terdapat beberapa PT yang akan mengadakan KKN tematik model UMD seperti Universitas Fajar, Universitas Megarezky, dan Universitas Bosowa berkoordinasi dengan Tim Teknis terkait permasalahan yang ada di desa, serta desa-desa yang dapat dipilih sebagai lokasi KKN (Kotak 3).

Salah satu fokus dari Tim Teknis UMD-KKN Tematik Kab. Pangkep adalah mendorong sinkronisasi antara bidang keilmuan dari universitas yang akan melaksanakan UMD-KKN Tematik dengan permasalahan yang ada di tingkat desa. Hingga saat ini ada beberapa contoh dari hasil koordinasi ini, yaitu:

- KKN oleh sejumlah mahasiswa dari Fakultas Farmasi, Universitas Megarezky sedang merancang dan membantu masyarakat mengolah tanaman lokal (sambiloto) untuk dijadikan obat tradisional di Desa Bulu Cindea. Kegiatan tersebut mereka fokuskan untuk menurunkan kasus darah tinggi yang terbilang cukup banyak di desa-desa saat ini.
- Mahasiswa Fakultas Kebidanan yang juga sedang fokus melanjutkan peningkatan kesehatan ibu dan anak di Desa Pitue, terutama kasus *stunting*.
- Selain itu menurut Tim Teknis, ada mahasiswa Universitas Fajar juga telah membantu petani dan pengusaha padi di desa Pattalassan untuk membuat karung beras dengan label nama desanya sendiri. Hal ini guna mendorong petani tidak menjual langsung beras mereka ke pedagang lain dari luar kabupaten.

Selain itu, Pemkab Pangkep saat ini aktif mendorong penyatuan rangkaian program UMD-KKN Tematik dengan siklus baku tahunan pembangunan desa dan melihat peran strategis mahasiswa berdasarkan bidang keilmuannya untuk menjadi mitra dari dinas-dinas di pemda. Saat ini KKN tematik di Kab. Pangkep diawali dengan musyawarah antara mahasiswa dan segenap pemangku kepentingan di desa dan kecamatan untuk mempertajam strategi kerja mahasiswa selama KKN. Musyawarah tersebut sekarang diberi nama musyawarah masyarakat desa (MMD) KKN. Musyawarah juga ditujukan agar mahasiswa mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk pendanaan oleh desa (Kotak 3). Selain itu, pemda memiliki rencana untuk menggunakan kegiatan KKN sebagai salah satu mekanisme *piloting* yang hasilnya dapat digunakan oleh dinas-dinas. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Bappeda Kab. Pangkep menyatakan, "Kami berharap agar OPD terkait terpicu dengan UMD, bahkan saya sendiri mengangkat topik UMD saat latihan kepemimpinan III. Desa Bulu Cindea sebenarnya target Dinas Pariwisata. Sekarang hasil KKN wisatanya sudah bagus, tinggal dilanjutkan saja."

Hal ini mendorong minat yang tinggi dari pemdes untuk mengadopsi kegiatan yang ditawarkan oleh kegiatan UMD, termasuk mendukung dalam hal pendanaan. Tim evaluasi menemukan ada komitmen yang cukup tinggi dari desa untuk mengadopsi dan mendanai kegiatan yang diinisiasi oleh UMD-KKN Tematik seperti di Desa Bulu Cindea. Kepala Desa Bulu Cindea menyatakan, "Kami akan berikan dana, karena kami butuh program mahasiswa ini yang menyentuh masyarakat." Selain itu menurut informasi dari Tim Teknis UMD, beberapa pemdes di Kab. Pangkep telah menambah pengalokasian anggaran belanja desa untuk memberi makanan tambahan kepada bayi dan balita. Hal ini setelah mendapat informasi tentang kondisi kesehatan masyarakat melalui kegiatan mahasiswa KKN tematik UMD. Salah satu contohnya adalah di Desa Pitue, di mana pemdes mengalokasikan 100 juta rupiah untuk kegiatan makanan tambahan yang dikoordinasi oleh PKK dari dana desa. Alokasi dana ini sebagai respons dari pengumpulan data *stunting* terbaru oleh mahasiswa Universitas Megarezky yang melakukan KKN tematik UMD.

Pihak desa mengapresiasi diskusi dan perencanaan kegiatan KKN Tematik antarpihak. Secara umum, pemdes di Kab. Pangkep menunjukkan keterlibatan dan minat yang tinggi dalam memfasilitasi kegiatan konsultasi antarpihak yang dilakukan sebagai bagian dari perencanaan pra-KKN tematik UMD. Dari kedua desa yang diobservasi, yaitu Desa Bulu Cindea dan Pitue, pemdes telah mampu memfasilitasi konsultasi antarpihak dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait seperti puskesmas, jajaran pemdes, dan para kader kesehatan desa. Para pemangku kepentingan berdiskusi memberi masukan terhadap rencana kegiatan mahasiswa di desa.

Saat ini Tim Teknis dibantu oleh Tim KOMPAK Kab. Pangkep sedang menyusun panduan UMD-KKN Tematik agar model ini dapat dilanjutkan secara efektif. Tim Teknis UMD bersama Koordinator KOMPAK Pangkep masih terus mempelajari proses UMD-KKN Tematik yang sedang berjalan. Salah satu prinsip utama dalam penyusunan menurut

mereka adalah bahwa pedoman pelaksanaan UMD-KKN Tematik harus memiliki fleksibilitas. Dengan demikian, memungkinkan bagi PT lain yang telah memiliki konsep tersendiri dalam KKN tematik tetap masih bisa melaksanakan KKN di Kab. Pangkep. Untuk itu, panduan tersebut akan digunakan bagi PT lainnya yang ingin fokus pada permasalahan yang ada di desa.

Meski kebijakan membentuk Tim Teknis menunjukkan bentuk kemitraan yang maju dalam kerangka UMD, kapasitas dan koordinasi kerja mereka masih terbatas dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat teknis dalam pelaksanaan program UMD-KKN Tematik. Studi ini menemukan kinerja sebagian besar anggota Tim Teknis masih terbatas secara formalitas, serta kurang memberikan masukan yang efektif dalam pemecahan masalah yang muncul selama kegiatan UMD. Mereka memberi informasi, rekomendasi penempatan mahasiswa, hingga menghadiri MMD, tapi belum banyak memberikan masukan secara substantial dan memberikan solusi terhadap permasalahan teknis yang muncul dalam pelaksanaan KKN Tematik. Berdasarkan informasi dari UNEJ, Tim Teknis di Pangkep belum dapat memberikan bantuan yang memadai untuk tim yang dikerahkan. Saat itu ada 15 mahasiswa UNEJ yang akan diterjunkan ketiga desa, namun universitas lain kurang berminat melakukan kolaborasi. Adapaun yang terjadi kemudian adalah satu desa ada 4 kelompok KKN yang bekerja. Tim teknis saat itu dirasa belum dapat memediasi dan menyelaraskan.

Meski pengalaman UMD-KKN Tematik telah sukses dengan mengajarkan keterampilan kewirausahaan kepada masyarakat Desa Bulu Cindea, namun untuk pengembangan sejumlah usaha produktif hasil dukungan KKN masih menghadapi tantangan pada manajemen pengelolaan hingga penguatan pemasarannya. Program UMD-KKN Tematik di Pangkep diakui telah berhasil menggandeng sejumlah mitra usaha, tapi masih ada terkendala dari sisi kapasitas dan kemampuan produksi masyarakat. Penelitian ini menemukan 3 produk hasil UMD-KKN Tematik di Desa Bulu Cindea, yaitu garam spa, garam iodium, nugget dan bakso bandeng belum bisa dipasarkan secara luas karena pengurus BUMDes belum mengurus perizinan produk-produk tersebut. Saat ini para anggota Kelompok Usaha Produksi tersebut, yang utamanya perempuan sementara berhenti bekerja menunggu produk mereka habis terjual oleh BUMDes yang masih mengharapkan penjualan dari pembeli yang datang ke desa mereka.

Keberlanjutan program yang diinisiasi oleh UMD-KKN Tematik kemudian bergantung pada kemampuan dan kapasitas dari pemerintah setempat yang hingga saat ini masih terbatas. Dari hasil penelusuran tim evaluasi, ada beberapa hal yang masih menjadi hambatan teknis utama dari Pemkab dan Pemdes Pangkep:

- **Kapasitas pendampingan program pemberdayaan ekonomi usaha kecil.** Jajaran Pemdes Bulu Cindea hingga saat ini belum mampu membantu memastikan keberlanjutan bisnis perdagangan makanan hasil olahan tangkapan nelayan di Desa Bulu Cindea agar lebih berkembang. Kendala utama terlihat dari kapasitas pengurus

BUMDes bersama kelompok-kelompok usaha produktif yang hingga saat ini belum mengurus sertifikat sehat dan halal produk agar terstandarisasi untuk dipasarkan ke luar desa sehingga dapat membantu kelancaran produksi.

- **Kapasitas untuk menyediakan infrastruktur penunjang.** Demikian juga dengan pengalaman KKN Tematik UNIFA di Kab. Pangkep yang telah menugaskan mahasiswa untuk mendata dan menginput profil desa ke dalam aplikasi yang dirancang oleh Jurusan TIK UNIFA. Data tersebut saat ini masih berada di server universitas tersebut, sehingga butuh komitmen dari Pemkab Pangkep jika ingin memanfaatkan data tersebut, yaitu dengan membeli lisensi dari UNIFA dan dipindahkan ke server milik daerah.

Penguatan fasilitas operasional dan kerja sama dengan BUMDes berpotensi menjadi solusi strategis untuk menindaklanjuti hasil dukungan program UMD di bidang usaha produktif. Kajian ini membandingkan antara keberlanjutan pemasaran hasil usaha produktif masyarakat di Desa Bulu Cindea dan Pitue oleh BUMDes mereka masing-masing. Jaringan internet adalah salah satu fasilitas vital yang harus dimiliki oleh kantor BUMDes. Dengan demikian menurut pengurus BUMDes di Desa Bulu Cindea, pihak Tokopedia dapat membantu pemasaran produk masyarakat, jika jaringan internet telah tersedia di BUMDes. Sementara itu BUMDes di Desa Pitue, meski telah didukung penuh pemasarannya oleh Tokopedia, tapi lokasi kantornya masih di belakang kantor desa, dan harus melalui gang sempit sehingga kurang atraktif bagi masyarakat umum. Pemdes Pitue sedang berencana membangun gedung baru BUMDes yang mudah diakses oleh umum.



Lokasi Wisata Hasil KKN Mahasiswa UNEJ di Desa Bulu Cindea, Kab. Pangkep



Sekretariat UMD Bappeda Kab. Pangkep

Lampiran 2. Tabel ringkasan kondisi implementasi inisiatif UMD-KKN tematik di tingkat desa

 Lokasi	 Bentuk Intervensi	 Kondisi Faktual
Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh	Pelatihan pengorganisasian, manajemen usaha, pembuatan, dan pemasaran anyaman eceng gondok	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Dari puluhan peserta pelatihan tahun 2016–2017 hanya tersisa belasan masyarakat yang masih memproduksi anyaman. ❑ Pemerintah ketiga desa menghentikan dukungan pendanaan kerajinan melalui BUMDes akibat minimnya keuntungan penjualan. ❑ KOMPAK masih membantu strategi pemasaran anyaman melalui <i>Local Economic Development Specialist</i>.
Desa		
<ul style="list-style-type: none"> ❑ Kubu ❑ Pelanteu ❑ Cot Jurumudi 		
 Lokasi	 Bentuk Intervensi	 Kondisi Faktual
Kab. Bondowoso, Prov. Jawa Timur	Program Desa Wisata	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Bangunan dan fasilitas wisata tidak terkelola dan dimanfaatkan secara maksimal. ❑ Jumlah wisatawan yang kian menurun.
Desa		
Glingseran		
Desa	 Bentuk Intervensi	 Kondisi Faktual
Glingseran	Program SAID	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Pusat pelayanan administrasi desa yang efektif di Desa Cerme. ❑ Data SAID belum pernah digunakan untuk bahan perencanaan pembangunan desa. ❑ Intervensi tumpang tindih tentang sistem pelayanan surat menyurat desa berbasis digital oleh program UMD dan Pemkab Bondowoso.



Lokasi

Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan

Desa

- ▣ Belabori
- ▣ Belapunranga



Bentuk Intervensi

Mengidentifikasi asset/potensi di dalam masyarakat



Kondisi Faktual

Semua program yang telah didampingi oleh UIN Alauddin berhenti dan tidak mendapat dukungan dari Pemkab Gowa.



Lokasi

Kab. Pangkep, Prov. Sulawesi Selatan

Desa

Bulu Cindea



Bentuk Intervensi

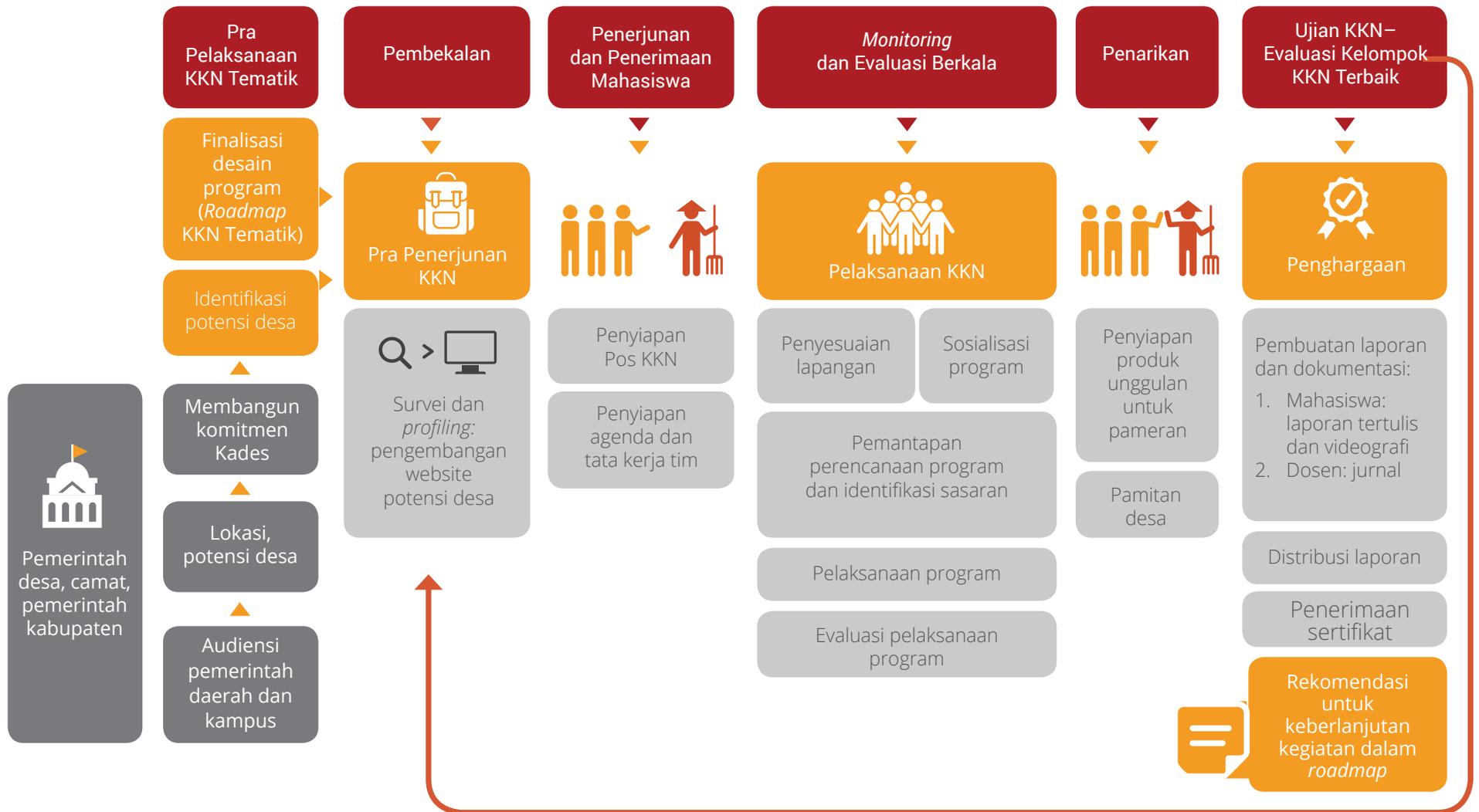
- ▣ Pembangunan desa wisata
- ▣ Pelatihan pengolahan nugget dan bakso berbahan baku ikan bandeng
- ▣ Pembuatan garam spa
- ▣ Pelatihan iodumisasi garam
- ▣ Penguatan SAID

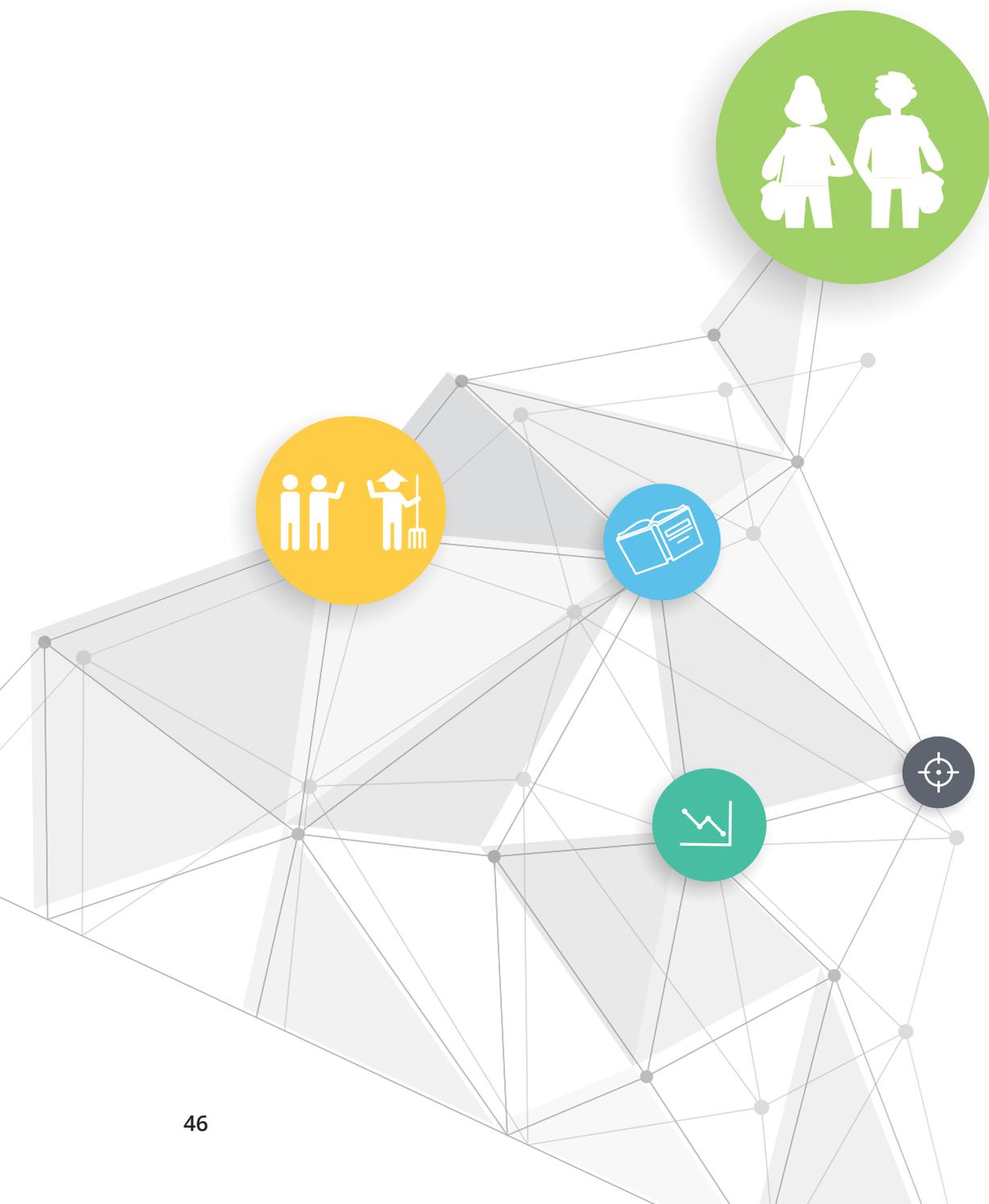


Kondisi Faktual

- ▣ Pengelolaan objek wisata pantai masih dijalankan oleh anggota pokdarwis.
- ▣ Kegiatan usaha kelompok tidak begitu lancar akibat pemasaran yang masih terbatas oleh BUMDes.
- ▣ *Marketplace* TOKOPEDIA menunggu kesiapan BUMDes untuk membantu pemasaran produk-produk yang dihasilkan masyarakat Desa Bulu Cindea sebagaimana telah berjalan di Desa Pitue, Kec. Ma'rang.
- ▣ SAID di kantor desa Bulu Cindea masih terlihat berjalan dengan baik (penataan ruangan kerja, sistem arsip, dan visualisasi kinerja pembangunan desa berbasis informasi dan teknologi).

Lampiran 3. Alur Pelaksanaan KKN Tematik Model UMD (Diadopsi dari alur pelaksanaan KKN Tematik Model UMD UNEJ)





Lampiran 4. SK Tim Teknis UMD-KKN Tematik Kab. Pangkep



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 222 TAHUN 2019
TENTANG

**TIM TEKNIS PROGRAM
UNIVERSITAS MEMBANGUN DESA MELALUI KULIAH KERJA NYATA TEMATIK
DI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2019**

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Universitas Membangun Desa sebagai salah satu upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019, maka perlu menetapkan Tim Teknis
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan dengan keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Mengingat :

KESATU : Tim Teknis Universitas Membangun Desa (UMD), melalui KKN Tematik di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis program Universitas Membangun Desa (UMD) melalui KKN Ternatik sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas membantu dan menentukan lokus kegiatan KKN serta menyampaikan data-data tentang potensi dan program kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa kepada Universitas atau Perguruan Tinggi yang akan melaksanakan KKN di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya Kampus dan Universitas agar dapat menghasilkan dampak yang lebih besar untuk Desa dan dapat mempercepat proses penurunan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan Desa serta memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan KKN Tematik.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 2 Februari 2019

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



SUSUNAN TIM TEKNIS PROGRAM UNIVERSITAS MEMBANGUN DESA
MELALUI KKN TEMATIK
KASUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2019

- I. Penanggung jawab : Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- II Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- III Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- IV Sekertaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- V Wakil Sekertaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- VI Anggota :
- 1 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 - 2 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 - 3 Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 - 4 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 - 5 Kepala Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 - 6 Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 - 7 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 - 8 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 - 9 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 - 10 Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 - 11 Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 - 12 Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 - 13 Kepala Dinas Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 - 14 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 - 15 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 - 16 Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

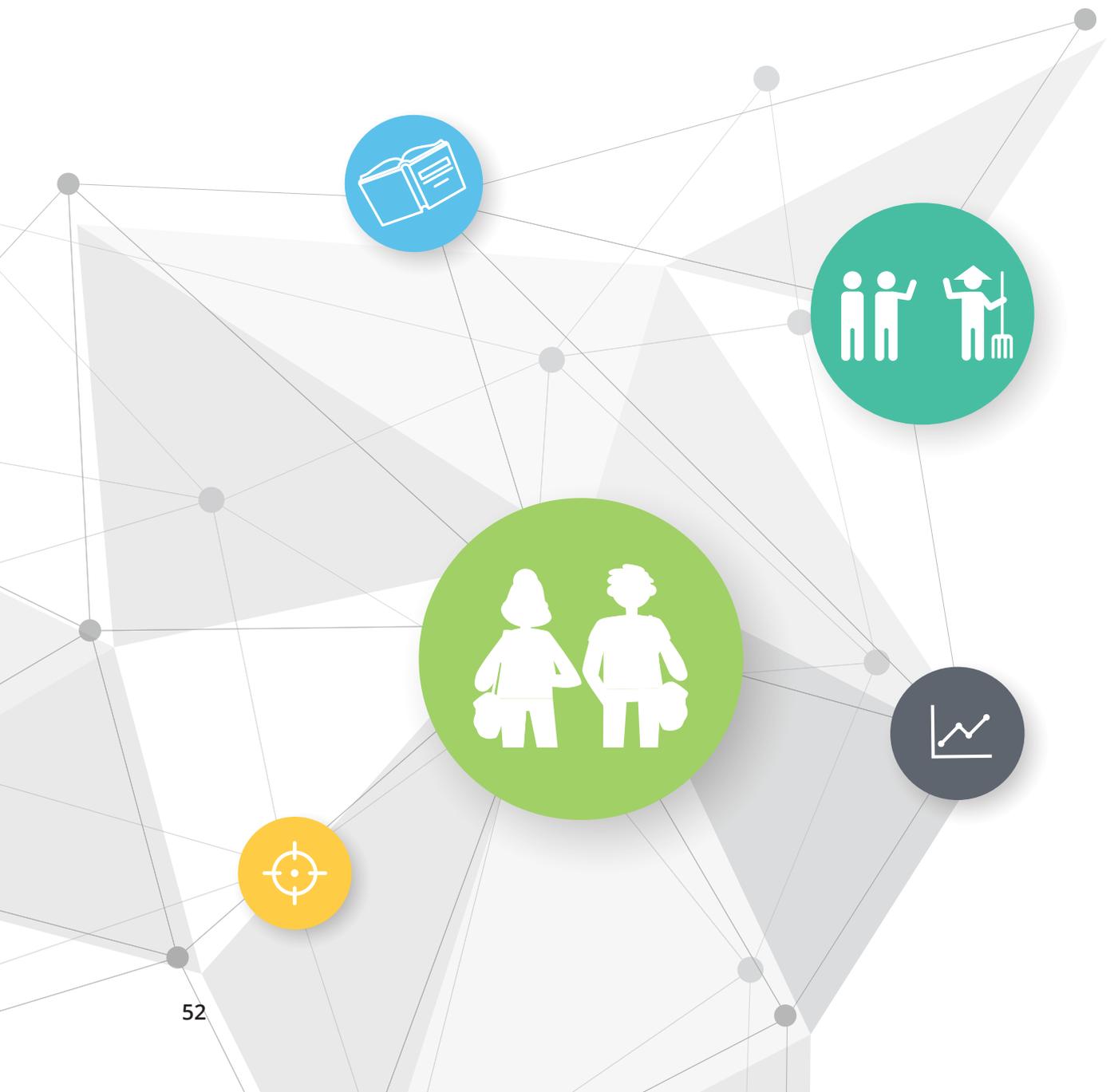
- 17 Kabag Administrasi Perekonomian dan SDA Setda
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 18 Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 19 Kabid Sosial budaya dan Pemerintahan Bappeda
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 20 Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Bappeda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 21 Kabid Perekonomian dan SDA Bappeda
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 22 Kabid Infrastruktur dan Pengembangan wilayah Bappeda
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 23 Kabid Pemerintahan Desa DPMD
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 24 KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan
untuk Kesejahteraan)
- 25 Ir. HATTA USMAN
- 26 MUHAMMAD ILHAM, SS, M.Si

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



SYAMSUDDIN A. HAMID





Lampiran 5. MoU/Nota Kesepahaman Pemkab Pangkep dan UNEJ



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
PEMERINTAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
dan
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
Tentang



PELAKSANAAN PROGRAM UNIVERSITAS MEMBANGUN DESA
MELALUI PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA TEMATIK
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : 014/14/KSD/VII /2019

NOMOR : 11072/UN25/KS/2019

Pada hari ini RABU, tanggal TIGA, bulan JULI , tahun DUARIBU SEMBILAN BELAS (03-07-2019), bertempat di Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. H. SYAMSUDDIN A. HAMID, S.E.

Bupati Pangkajene dan Kepulauan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Pangkajene selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Drs. MOH. HASAN, M.Sc., Ph.D.

Rektor Universitas Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jember yang berkedudukan di Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Tegal Boto selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal I

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan landasan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja sama Universitas Membangun Desa melalui penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini adalah;

1. Universitas Jember menyiapkan sumber daya berupa Mahasiswa yang akan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Mahasiswa melakukan Kuliah Kerja Nyata Tematik guna mendorong desa dan Masyarakat desa menjadi Mandiri;
3. Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bertanggung jawab atas penyiapan lokasi Kuliah Kerja Nyata Tematik; dan
5. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bertanggung jawab atas penyediaan tema yang akan dilakukan pada Kuliah Kerja Nyata Tematik dengan menyesuaikan pada keselarasan keilmuan dari Universitas Negeri Jember

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindak lanjuti oleh PARA PIHAK, seperti yang tertuang dalam dokumen Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kuliah Kerja Nyata Tematik mengacu padajadwal Universitas.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Jadwal waktu berlakunya nota Kesepahaman ini selama masih dikehendaki oleh PARA PIHAK dan dapat diakhiri atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila PARA PIHAK tidak berkehendak untuk mengakhirinya , maka Nota Kesepahaman ini secara otomatis diperpanjang.

Pasal 5

EVALUASI

Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala, evaluasi akan dilakukan setidaknya diakhir setiap pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik dan dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

TAMBAHAN(ADDENDUM)

- (1) Ketentuan yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini
- (2) Setiap lampiran dari Nota Kesepahaman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam Pelaksanaan Nota Kesepahaman terjadi Perbedaan pendapat atau Perselisihan, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara Musyawarah untuk mencapai Mufakat .

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal disebutkan dalam awal Naskah Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh Lembaga masing-masing dan secara Yuridis mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Rektor



H. SYAMSUDDIN A. HAMID, S.E.

PIHAK KEDUA

Universitas Jember



Drs. MOH. HASAN, M.Sc., Ph.D.

KOMPAK

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta 10320 Indonesia

T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090

E: info@kompak.or.id

www.kompak.or.id

ISBN 978-623-6080-01-6 (PDF)

